



P U T U S A N

Nomor 134 PK/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **H. FITRI RIFANI, SH., MH., bin H. DARKANI SEMAN;**

Tempat Lahir : Amuntai;

Umur/Tanggal Lahir : 63 Tahun/1 Juni 1954;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sultan Adam, Komplek Mandiri Permai Nomor 2 RT.034 RW.003, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Selatan);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 1 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 16 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. FITRI RIFANI, SH., MH., bin H. DARKANI SEMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa H. FITRI RIFANI, SH., MH., bin H. DARKANI SEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa H. FITRI RIFANI, SH., MH., bin H. DARKANI SEMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa H. FITRI RIFANI, SH., MH., bin H. DARKANI SEMAN untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Hal. 2 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti sesuai Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin:

- Nomor 66/Persit/TPK/2013/PN.Bjm tanggal 28 Agustus 2013;
- Nomor 78/Persit/TPK/2013/PN.Bjm tanggal 28 Oktober 2013;
- Nomor 84/Persit/TPK/2013/PN.Bjm tanggal 18 Desember 2013; serta
- Nomor 86/Persit/TPK/2013/PN.Bjm tanggal 3 Januari 2013;

Sebagaimana diuraikan dalam berkas perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD MUCHLIS GAFURI;

7. Membebaskan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm tanggal 19 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. FITRI RIFANI, SH., MH., bin H. DARKANI SEMAN tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. FITRI RIFANI, SH., MH., bin H. DARKANI SEMAN terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Subsidiar, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana,
4. Melepaskan Terdakwa H. FITRI RIFANI, SH., MH., bin H. DARKANI SEMAN dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan seketika itu dari penahanan;
7. Menetapkan barang bukti sesuai Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin:

Penetapan Nomor 66/Persit/TPK/2013/PN.BJM tanggal 28 Agustus 2013 atas benda berupa:

1. Copy Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 27 Tahun 2009 tanggal 06 Oktober 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun

Hal. 3 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



- 2010;
2. *Copy* Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/07/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010;
 3. *Copy* keputusan pengguna anggaran sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 188.47/01/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis (PPTK) di lingkungan sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010;
 4. *Copy* Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang pemberian bantuan keuangan atas beban anggaran 2010 pada belanja daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010 pada kegiatan bantuan pembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umat beragama dan bantuan sosial kemasyarakatan;
 5. *Copy* Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/0571/KUM/2010 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2011;
 6. *Copy* DPA-SKPD Tahun Anggaran 2010 Biro Kesejahteraan Rakyat no reg. DPA 1.20.03.05-041/2010 tanggal 03 Desember 2010 Rp57.219.000.000,00;
 7. *Copy* Revisi DPA –SKPD Tahun Anggaran 2010 biro kesejahteraan rakyat no reg. DPA 1.20.03.05.,0001/2010 tanggal 21 Januari 2010 Rp34.048.000.000,00;
 8. *Copy* Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 biro kesejahteraan rakyat no reg DPA 1.20.03. 05,00064/2010 tanggal 21 September 2010 Rp92.419.000.000,00;

Hal. 4 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Copy SP2D Nomor /tanggal: 00721/BTL/LS-BT/17 Maret 2010, pembayaran langsung bantuan sosial kemasyarakatan Tahun Anggaran 2010 Rp9.115.500.000,00 dan kelengkapannya;
10. Copy SP2D Nomor /tanggal: 01647/BTL/LS-BT/19 April 2010, pembayaran langsung bantuan sosial organisasi kemasyarakatan Tahun Anggaran 2010 Rp9.348.800.000,00 dan kelengkapannya;
11. Copy SP2D Nomor /tanggal: 03050/BTL/LS-BT/26 Mei 2010, pembayaran langsung bantuan sosial organisasi kemasyarakatan Tahun Anggaran 2010 Rp8.211.000.000,00 dan kelengkapannya;
12. Copy SP2D Nomor /tanggal: 04848/BTL/LS-BT/19 Juli 2010, pembayaran langsung bantuan sosial organisasi kemasyarakatan Tahun Anggaran 2010 Rp7.046.300.000,00 dan kelengkapannya;
13. Copy SP2D Nomor /tanggal: 07123/BTL/LS-BT/21 September 2010, pembayaran langsung bantuan sosial organisasi kemasyarakatan Tahun Anggaran 2010 Rp6.082.000.000,00 dan kelengkapannya.
14. Copy SP2D Nomor /tanggal: 08958/BTL/LS-BT/08 November 2010, pembayaran langsung bantuan sosial organisasi kemasyarakatan Tahun Anggaran 2010 Rp10.358.000.000,00 dan kelengkapannya;
15. Copy SP2D Nomor /tanggal: 11019/BTL/LS-BT/13 Desember 2010, pembayaran langsung bantuan sosial organisasi kemasyarakatan Tahun Anggaran 2010 Rp4.369.300,00 dan kelengkapannya;
16. Copy petikan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 821.22/01-01-BKD/2012 tanggal 21 Maret 2012;
17. Copy daftar organisasi masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yang memperoleh surat keterangan terdaftar dari kesbangpolinmas Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2009,2010,2011,2012;
18. Buku salinan kas umum dan laporan realisasi anggaran biro kesra bulan Januari 2010;
19. Buku salinan kas umum dan laporan realisasi anggaran biro kesra bulan Februari 2010;
20. Buku salinan kas umum dan laporan realisasi anggaran biro kesra bulan Maret 2010;

Hal. 5 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Buku salinan kas umum dan laporan realisasi anggaran biro kesra bulan April 2010;
22. Buku salinan kas umum dan laporan realisasi anggaran biro kesra bulan Mei 2010;
23. Buku salinan kas umum dan laporan realisasi anggaran biro kesra bulan Juni 2010;
24. Salinan daftar kwitansi bantuan sosial kemasyarakatan bulan Maret 2010;
25. Salinan daftar kwitansi bantuan sosial kemasyarakatan bulan April 2010;
26. Salinan daftar kwitansi bantuan sosial kemasyarakatan bulan Mei 2010;
27. Salinan daftar kwitansi bantuan sosial kemasyarakatan bulan Juli 2010;
28. Salinan daftar kwitansi bantuan sosial kemasyarakatan bulan September 2010;
29. Salinan daftar kwitansi bantuan sosial kemasyarakatan bulan November 2010;
30. Salinan daftar kwitansi bantuan sosial kemasyarakatan bulan Desember 2010;
31. 1 (satu) bundel Nota Dinas dari Kepala Biro Kesra kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel No.451/01/Agm/Kesra s/d Nomor 451/08/Agm/Kesra Februari 2009 perihal permohonan bantuan dana;
32. Nota dinas dari Kepala Biro Kesra kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Nomor 451/10/Agm/Kesra dan Nomor 451/24/Agm/Kesra Maret 2010 perihal permohonan bantuan dana;
33. Nota dinas dari Kepala Biro Kesra kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 451/38/Agm/Kesra s/d Nomor 451/39/Agm/Kesra, April 2010 perihal permohonan bantuan dana;

Hal. 6 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Nota dinas dari Kepala Biro Kesra kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 451/41/Agm/Kesra s/d Nomor 451/48/Agm/Kesra, April 2010 perihal permohonan bantuan dana;
35. Nota dinas dari Kepala Biro Kesra kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 451/49/Agm/Kesra s/d Nomor 451/51/Agm/Kesra, Mei 2010 perihal permohonan bantuan dana;
36. Nota dinas dari Kepala Biro Kesra kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 451/64/Agm/Kesra s/d Nomor 451/73/Agm/Kesra, Mei 2010 perihal permohonan bantuan dana;
37. Nota dinas dari Kepala Biro Kesra kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 451/51/Agm/Kesra s/d Nomor 451/77/Agm/Kesra, Mei 2010 perihal permohonan bantuan dana;
38. Nota dinas dari Kepala Biro Kesra kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 451/78/Agm/Kesra s/d Nomor 451/86/Agm/Kesra, Juni 2010 perihal permohonan bantuan dana;
39. Nota dinas dari Kepala Biro Kesra kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 451/95/Agm/Kesra s/d Nomor 451/107/Agm/Kesra, Juli 2010 perihal permohonan bantuan dana;
40. Nota dinas dari Kepala Biro Kesra kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 451/108/Agm/Kesra s/d Nomor 451/109/Agm/Kesra, Juli 2010 perihal permohonan bantuan dana;
41. Nota dinas dari Kepala Biro Kesra kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 451/110/Agm/Kesra s/d Nomor 451/118/Agm/Kesra, Agustus 2010 perihal permohonan bantuan dana;

Hal. 7 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Nota dinas dari Kepala Biro Kesra kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 451/119/Agm/Kesra s/d Nomor 451/122/Agm/Kesra, September 2010 perihal permohonan bantuan dana;
43. Nota dinas dari Kepala Biro Kesra kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 451/123/Agm/Kesra s/d Nomor 451/140/Agm/Kesra, September 2010 perihal permohonan bantuan dana;
44. Nota dinas dari Kepala Biro Kesra kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 451/141/Agm/Kesra s/d Nomor 451/146/Agm/Kesra, Oktober 2010 perihal permohonan bantuan dana;
45. Nota dinas dari Kepala Biro Kesra kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 451/147/Agm/Kesra s/d Nomor 451/152/Agm/Kesra, November 2010 perihal permohonan bantuan dana;
46. Nota dinas dari Kepala Biro Kesra kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 451/155/Agm/Kesra s/d Nomor 451/156/Agm/Kesra, November 2010 perihal permohonan bantuan dana;
47. Nota dinas dari Kepala Biro Kesra kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 451/159/Agm/Kesra s/d Nomor 451/163/Agm/Kesra, November 2010 perihal permohonan bantuan dana;
48. Nota dinas dari Kepala Biro Kesra kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 451/166/Agm/Kesra s/d Nomor 451/169/Agm/Kesra, November 2010 perihal permohonan bantuan dana;
49. Nota dinas dari Kepala Biro Kesra kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 451/171/Agm/Kesra s/d Nomor 451/193/Agm/Kesra, November 2010 perihal permohonan bantuan dana;

Hal. 8 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Nota dinas dari Kepala Biro Kesra kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 451/196/Agm/Kesra s/d Nomor 451/200/Agm/Kesra, November 2010 perihal permohonan bantuan dana;
51. Nota dinas dari Kepala Biro Kesra kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 451/201/Agm/Kesra s/d Nomor 451/107/Agm/Kesra, Desember 2010 perihal permohonan bantuan dana;
52. Nota dinas dari Kepala Biro Kesra kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 451/217/Agm/Kesra s/d Nomor 451/218/Agm/Kesra, Desember 2010 perihal permohonan bantuan dana;
53. Surat Pengantar Permohonan Bantuan Anggota Dari DPRD atas nama H. Abdul Latif Hanafiah, Msc, 02 Maret 2010;
54. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Zulkifli Hagan, SH. MH, Maret 2010;
55. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama M. Husaini, SE. MM, April 2010;
56. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ali Akbar Wijaya, ST, Maret 2010;
57. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Ali Baderun, ST, Maret 2010;
58. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Zulkifli Hagan, SH. MH, Maret 2010;
59. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama M. Husaini, SE. MM, Maret 2010.
60. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama M. H. M. Husaini Aliman, SE, 12 Maret 2010;
61. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama M. M. Tursi, S. Sos.;
62. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. M. Husaini Aliman, SE, 22 Februari 2010;

Hal. 9 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Drs. Riduan, MS, 24 Maret 2010;
64. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ir. Burhanuddin, 15 Maret 2010;
65. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Riduansyah, SH, 03 Februari 2010;
66. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Muhidin, 15 Maret 2010;
67. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Asmara Yanto, 09 Maret 2010;
68. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Akhmad JaJuli, S.Ked, Maret 2010;
69. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Drs. H. Budiman Mustafa, Maret 2010;
70. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Husaini Suni, Lc, Maret 2010;
71. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Muhammad Nur, 31Maret 2010;
72. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Nasrullah, S. Pd.I, Maret 2010;
73. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Drs. Midi Yusi, Maret 2010;
74. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Fathurrahman, S. Pd.I, Maret 2010;
75. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Drs. Midi Yusi, Maret 2010;
76. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Habib Ali Khaidar Alkaff, Maret 2010;
77. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama M. Rafi'ie Muksin, S. Ag, Maret 2010;
78. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Zainal Arifin, SH. MH, Maret 2010;

Hal. 10 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Nasrullah AR, S. Pd.I.;
80. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ansor Ramadhan, M. Fil.I.;
81. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Puar Junaidi, S. Sos, Maret 2010;
82. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Puar Junadi, Maret 2010;
83. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Drs. Syarifuddin Sabang, Maret 2010;
84. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ir. Gusti Perdana Kesuma, April 2010;
85. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Novianti, 20 April 2010;
86. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Soeyono, 20 April 2010;
87. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Abdul Latif Hanafiah, Msc, 12 April 2010;
88. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. M. Karno HA, Mei 2010;
89. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Hj. Rosnani, April 2010;
90. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Riduansyah, SH, 22 Maret 2010;
91. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Habib Said Hasan Al Habsyie, Msc, 03 Mei 2010;
92. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Dr. H. Bardiansyah, MM, Maret 2010;
93. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ir. H. Hasmy Fadilah Akbar, MM, Maret 2010;
94. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama M. Ihsanuddin, Maret 2010;

Hal. 11 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ibnu Sina, S. Pi, Maret 2010;
96. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Hermansyah, 15 Juni 2010.
97. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Susan, SH. MH, April 2010;
98. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Hj. Rosnani, SH, Mei 2010;
99. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Hermansyah, 15 Juni 2010;
100. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Susan, SH. MH, Mei 2010;
101. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Drs. Syafruddin Sabang, Mei 2010;
102. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Dra. Hj. Hera farina, MM. Mei 2010;
103. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Faturrahman, S. Pd.I. Juni 2010 Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Faturrahman, S. Pd.I. Juni 2010;
104. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Muhammad Nur, April 2010;
105. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. M. Husaini Aliman, SE, 21 April 2010;
106. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. A. Bisung, Maret 2010;
107. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Ansor Ramadlan, M.Fil.I.;
108. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Puar Junaidi, S.sos, Mei 2010;
109. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ali Akbar Wijaya, ST, April 2010;

Hal. 12 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Hj. Hariyatie, 05 November 2010;
111. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Hj. Ferita Hariyani, SE, Maret 2010;
112. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Zainal Arifin, SH. MH. 09 April 2010;
113. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Dra. Maitri Puspa Koesasih, April 2010;
114. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama M. Rafi'l Muksin, S. Ag, Juni 2010;
115. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Zaini, SH. MH. Mkn, 20 April 2010;
116. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Gusti Rudiansyah, April 2010;
117. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Kol. TNI. (PUR) Nasib Alamsyah, April 2010;
118. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Hj. Rosnani, SH, Juni 2010;
119. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Dra. Hj. Hera Farina, MM, Juli 2010;
120. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Gusti Rudiansyah, Juli 2010;
121. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Ansor Ramadlan, M. Fil.I, April 2010;
122. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Akhmad Jazuli, S.Ked.M.Ap, Juni 2010;
123. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Asmara Yanto, SH, 12 Juli 2010;
124. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Drs. H. Riduan MS, 08 Juli 2010;
125. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ali Akbar Wijaya, ST, Juli 2010;

Hal. 13 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Novianti, 20 April 2010;
127. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Habib Said Hasan Al Habsyie, 25 Juni 2010;
128. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Husaini Suni, Lc, 25 April 2010;
129. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. M. Iqbal Yudiannoor, 12 Juli 2010;
130. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Ali Baderun, Juli 2010;
131. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Safaruddin, 27 Mei 2010;
132. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Muhammad Yusri, 22 Juni 2010;
133. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Abdul hakim Halim, SE. MM, 12 Juli 2010;
134. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Hj. Ferita Hariyani, Juni 2010;
135. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Drs. H. A. Munasib Halikie, 24 Juni 2010;
136. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Muh. Ihsanuddin, Mei 2010;
137. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Drs. H, Budiman Mustafa, Juni 2010;
138. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Drs. H. Budiman Mustafa, Mei 2010;
139. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ir. Burhanudin, 05 Juni 2010;
140. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Soeyono, 01 Juni 2010;
141. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Muhidin, 16 Juni 2010;

Hal. 14 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Ahmad Bisung, Juni 2010;
143. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Ahmad Bisung, Mei 2010;
144. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Ahmad Bisung, Mei 2010;
145. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Soeyono, 24 Juni 2010;
146. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Drs. H. Mansyah Sabri, April 2010;
147. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Muhaimin, SH. Mh. Mkn.;
148. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. M. Husaini Aliman, SE, 20 Mei 2010;
149. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. M. Karno HA, Mei 2010;
150. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Mulyadi Mangin, SE.;
151. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Abdul Latif Hanafiah, Msc, 12 April 2010;
152. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. M. Karno HA, Mei 2010;
153. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Habib Said Hasan Al Habsyie, 03 Mei 2010;
154. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Hj. Rosnani, SH. April 2010;
155. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama DR. H. Bardiansyah, Maret 2010;
156. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ir. H. Hasmy Fadillah Akbar, MM, Maret 2010;
157. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Muh. Ihsanuddin, Maret 2010;

Hal. 15 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ibnu Sina, Maret 2010;
159. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Hj. Rosnani, SH, Mei 2010;
160. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. M. Husaini Aliman, SE, 21 April 2010;
161. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ali Akbar, ST, April 2010;
162. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Hj. Hariyatie, November 2010;
163. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ir. Gusti Perdana Kesuma, April 2010;
164. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Dra. Maitri Puspa Koesasih, April 2010;
165. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama M. Rafi'l Muksin, S. Ag, Juni 2010;
166. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Zaini, SH. MH, Mkn, 20 April 2010.
167. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Gusti Rudiansyah, SmHK, April 2010;
168. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Kol. TNI. (Pur) Nasib Alamsyah, April 2010;
169. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Novianti, 20 April 2010;
170. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Soeyono, 20 April 2010;
171. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Drs. H. Riduan MS, 08 Juli 2010;
172. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Hj. Rosnani, SH, Juni 2010;
173. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Gusti Rudiansyah, Juli 2010;

Hal. 16 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Asmara yanto, SH, 12 Juli 2010;
175. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ali Akbar, ST, Juli 2010;
176. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Novianti, 20 April 2010;
177. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Habib Said Hasan Al Habsyie, Bsc, 25 Juni 2010;
178. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Husaini Suni, Lc, 25 Juni 2010;
179. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Muhammad Yusri, S. Sos, 22 Juni 2010;
180. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. M. Husaini Aliman, SE, 20 Mei 2010;
181. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Abdul Halim, 12 Juli 2010;
182. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Drs. H. A. Munasib halike, 24 Juni 2010;
183. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Muh. Ihsanudin, Mei 2010;
184. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ir. Burhanuddin, 05 Juni 2010;
185. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Muhidin, 16 Juni 2010;
186. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. M. Karno HA, Mei 2010;
187. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Mulyadi Mangin, SE.;
188. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Mansyah Sabri, April 2010;
189. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Kol. TNI (Pur) Nasib Alamsyah, April 2010;

Hal. 17 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Akhmad Jazuli, S. Ked,M.Ap, Juni 2010;
191. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Soeyono, 24 Juni 2010;
192. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H.A. Bisung, Mei 2010;
193. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Dra. Hj. Hera Farina, MM, Juli 2010;
194. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H.A. Bisung, Mei 2010;
195. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Hermansyah, 15 Juni 2010;
196. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Anshor Ramadhan, M.Fil.;
197. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Zainal Arifin, SH., MH., 09 April 2010;
198. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Anshor Ramadhan, M.Fil.;
199. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. A. Bisung, Maret 2010;
200. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Hj. Ferita Hariyani, SE. Maret 2010;
201. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Drs. H. Mansyah Sabri, Oktober 2010;
202. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Drs. Syarifuddin Sabang, Oktober 2010;
203. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Susan, SH. MH, Oktober 2010;
204. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ir. Gusti Perdana Kesuma, Oktober 2010;
205. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. M. Karno, HA, Oktober 2010;

Hal. 18 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Susan, SH. MH, Oktober 2010;
207. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. M. Karno, HA, Oktober 2010;
208. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. M. Karno, HA, Oktober 2010;
209. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama DR. H. Bardiansyah, MM. Oktober 2010;
210. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Drs. H. Mansyah Sabri, Oktober 2010;
211. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ir. H. Hasmy Fadilah Akbar, MM, Oktober 2010;
212. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Susan, SH. MH, Oktober 2010;
213. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Dr. H. Bardiansyah, MM, Oktober 2010;
214. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Puar Junaidi, S. Sos, Oktober 2010;
215. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Drs. Syarifuddin Sabang, Oktober 2010;
216. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Drs. Syarifuddin Sabang, Oktober 2010.
217. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Gusti Rudiansyah, SmHK, Oktober;
218. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Kol. TNI (Pur) Nasib Alamsyah, Agustus 2010;
219. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Gusti Rudiansyah, SmHK, Oktober 2010;
220. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Puar Junaidi, S.Sos;
221. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Gusti Rudiansyah, SmHK, Agustus 2010;

Hal. 19 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Susan, SH. MH, Agustus 2010;
223. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ir. Gusti Perdana Kesuma, Agustus 2010;
224. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama DR. H. Bardiansyah, MM. Agustus 2010;
225. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Drs. H. Budiman Mustafa, 26 Oktober 2010;
226. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ibnu Sina, S.Pi, November 2010;
227. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Habib Said Hasan Al-Habsyi, November 2010;
228. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Husaini Suni, Lc, 26 Oktober 2010;
229. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Muh. Ihsanuddin, 28 Oktober 2010;
230. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Muh. Ihsanuddin, 28 Oktober 2010;
231. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Akhmad Jazuli, S.Ked, M.Ap, November 2010;
232. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ibnu Sina, S.Pi, November 2010;
233. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Muh. Ihsanuddin, 12 Oktober 2010;
234. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Habib Said Hasan Al Habsyie, 26 Oktober 2010;
235. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Habib Said Hasan Al Habsyie, November 2010;
236. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Riswandi, S.IP, Oktober 2010;
237. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Drs. H. Budiman Mustafa, 26 Oktober;

Hal. 20 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Habib Said Hasan Al Habsyie, 02 Oktober;
239. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Muh. Ihsanuddin, 18 Agustus 2010;
240. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ibnu Sina, S.Pi, Juli 2010;
241. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Akhmad Jazuli, S.Ked, MAP, Juli 2010;
242. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Drs. H. Riduan MS, 08 Oktober 2010;
243. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Rudiansyah, SH, November 2010;
244. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Muhidin, Agustus 2010;
245. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ir. Burhanuddin, Oktober 2010;
246. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Muhidin, Juli 2010;
247. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Asmara Yanto, SH, 02 November 2010;
248. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Muhidin, Juli 2010;
249. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Rudiansyah, SH, 20 Juli 2010;
250. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Hj. Ferita Hariyani, SE, September 2010;
251. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Akhmad Bisung, Oktober 2010;
252. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Safaruddin, SH. MH, 22 Oktober 2010;
253. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Akhmad Bisung, Oktober 2010;

Hal. 21 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ali Akbar Wijaya, ST, Oktober 2010;
255. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ir. Burhanuddin, 08 Agustus 2010;
256. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Ali Baderun, Oktober 2010;
257. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama M. Husaini, SE, MM, Oktober 2010;
258. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Dra. Hj, Hera farina, MM, Oktober 2010;
259. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Hj. Ferita Hariyani,SH, Oktober 2010;
260. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Hj. Ferita Hariyani,SH, 04 Agustus 2010;
261. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Ali Baderun, Agustus 2010;
262. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Hj. Ferita Hariyani, SE.;
263. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Soeyono, 24 Juni 2010;
264. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Novianti, Juli 2010;
265. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Novianti, Juli 2010;
266. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Zaini, SH. MH,Mkn, Juli 2010;
267. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Dra. Maitri Puspa Koesasih, M. Ap.;
268. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ir. Soegeng Soesanto, Desember 2010;
269. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ir. Soegeng Soesanto, November 2010;

Hal. 22 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Abdul Hakim halim, SE, MM, 01 November 2010;
271. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Dra. Maitri Puspa Koesasih, M.Ap, 01 November 2010;
272. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H.M. Husaini Aliman, SE, MM, September 2010;
273. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Abdul Hakim Halim, SE. MM, 31 Juli 2010;
274. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Abdul Hakim Halim, SE. MM, 31 Juli 2010;
275. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H.M. Yusri, SE, September 2010;
276. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Dra. Maitri Puspa Koesasih, M. Ap, 03 Agustus 2010;
277. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Abdul Hakim Halim, SE. MM, 18 Agustus 2010;
278. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama drs. H. Abdul Latief Hanafiah, M.Sc, 10 Desember 2010;
279. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Hj. Rosnani, Sh, Desember 2010;
280. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Drs. H. A. Munasib Halikie, 22 November 2010;
281. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Hj. Hariyatie, 19 November 2010;
282. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Drs. H. Abdul latif Hanafiah, M. Sc, 10 Desember 2010;
283. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Mulyadi Mangin, SE.;
284. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Hj. Rosnani, SH, Oktober 2010;
285. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Hj. Hariyatie, 20 November 2010;

Hal. 23 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Muhammad Nur;
287. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Abdul Latief Hanafiah, M. Sc. 15 Juli 2010;
288. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ilham Noor, ST.;
289. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Drs. Midy Yusi;
290. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Habib Ali Al Habsyie;
291. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Nashrullah, AR,S.Pd.I.;
292. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Faturrahman, S.Pd.I.;
293. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Drs. Midi Yusi;
294. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Anshor Ramadhan, S.Ag.;
295. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama M. Rafi'l Muksin, S.Ag.;
296. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Habib Ali Khaidir AlKaff;
297. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Zainal Arifin, SH. MH.;
298. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama Ilham Noor, St, 31 Juli 2010;
299. Surat pengantar permohonan bantuan anggota dari DPRD atas nama H. Zainal Arifin, SH. MH.;
300. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. Aranio, karang intan, astambul, simpang empat, mataram, perangon, sambung makmur, peramasan, sungai pinang, telga bauntung, kab. Banjar;

Hal. 24 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. Aluh-aluh, kab. Banjar;
302. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. Gambut, beruntung baru, kertak hanyar, tatah makmur kab. Banjar;
303. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. Martapura timur, martapura barat, kab. Banjar;
304. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. Sungai tabuk, kab. Banjar;
305. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. Martapura kota, kab. Banjar;
306. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. banjarmasin utara, kota banjarmasin;
307. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. banjarmasin timur, kota banjarmasin;
308. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. banjarmasin tengah, kota banjarmasin;
309. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. banjarmasin barat, kota banjarmasin;
310. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. banjarmasin selatan, kota banjarmasin;
311. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. landasan ulin, cempaka, banjarbaru utara, banjarbaru selatan, liang anggung, kota banjarbaru;
312. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. paminggir, haur gading, danau panggung, bajang, kab. HSU;
313. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. babirik, amuntai utara, amuntai tengah, kab. HSU;
314. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. amuntai selatan, sungai tabukan, sungai pandan, kab. HSU;

Hal. 25 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec.kandangan, simpur, padang batung, sungai raya, kelumpang, angkinang, telaga langsung, kab. HSS;
316. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec.batang alai selatan, batang alai timur, benawa, batang alai utara, kab. HST;
317. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec.hantakan, haruyan, Labuan amas selatan, Labuan amas utara, limpasu, kab. HST;
318. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec.tapin tengah, candi laras selatan, candi laras utara, tapin selatan, tapin utara, lokpaikat, bungur, piani, bakarangan, kab. Tapin;
319. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec.Bintang ara, Upau, Muara harus, banua Lawas, kelua, pugaan, tanta, kab. Tabalong;
320. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec.tanjung, murung pudak, jaro, muara uya, haruai, kab. Tabalong;
321. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec.marabahan, jejangkit, mekarsari, wanaraya, bakumpai, mandastana, kab. Batola;
322. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec.tamban, kuripan, rantau badauh, kab. Batola;
323. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec.belawang, anjir pasar, anjir muara, mandastana, kab. Batola;
324. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec.tabukan, carbon, alalak, kab. Batola;
325. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec.tabunganen, barambai, kab. Batola;

Hal. 26 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec.angsana, sungai loban, kusan hilir, kab. Tanah Bumbu;
327. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec.simpang empat, karang bintang, mentewe, kusan hulu, kuranji, satui, kab. Tanah Bumbu;
328. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec.Lampihong, awayan, batumandi, halong, kab. Balangan;
329. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec.juai, paringin kota, paringin selatan, tebing tinggi, kab. Balangan;
330. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec.pulau laut utara, pulau laut timur, kab. Kotabaru;
331. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 rekomendasi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan;
332. 1 (satu) bundel hasil verifikasi data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. Gambut, beruntung baru, kertak hanyar, tatah makmur, kab. Banjar;
333. 1 (satu) bundel hasil verifikasi data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. Martapura Timur, Martapura barat, kab. Banjar;
334. 1 (satu) bundel hasil verifikasi data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. Sungai tabuk, kab. Banjar;
335. 1 (satu) bundel hasil verifikasi data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. Martapura kota, kab. Banjar;
336. 1 (satu) bundel hasil verifikasi data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. Aluh-aluh, kab. Banjar;
337. 1 (satu) bundel hasil verifikasi data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. Aranio, karang intan, astambul, simpang empat, mataram, perangon, sambung makmur, pemasaran, sungai pinang, telaga bauntung, kab. Banjar;

Hal. 27 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338. 1 (satu) bundel hasil verifikasi data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. Banjarmasin utara, Banjarmasin timur, Banjarmasin tengah, Banjarmasin barat, Banjarmasin selatan, kota banjarmasin;
339. 1 (satu) bundel hasil verifikasi data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. Landasan ulin, cempaka, banjarbaru utara, banjarbaru selatan, liang anggung, kota banjarbaru;
340. 1 (satu) bundel hasil verifikasi data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. Paminggir, haur gading, danau panggung, bajang, kab. HSU;
341. 1 (satu) bundel hasil verifikasi data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. Babirik, amuntai utara, amuntai tengah, kab. HSU;
342. 1 (satu) bundel hasil verifikasi data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. Amuntai selatan, sungai tabukan, sungai pandan, kab. HSU;
343. 1 (satu) bundel hasil verifikasi data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. Kandangan, simpur, padang batung, sungai raya, kelumpang, angkinang, telaga langsung, kab. HSS;
344. 1 (satu) bundel hasil verifikasi data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. Barabai, batang alai selatan, batu benawa, batang alai utara, hantakan, haruyan, labugan emas selatan, labuhan emas utara limpasu, kab. HST;
345. 1 (satu) bundel hasil verifikasi data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. Tapin tengah, candi laras selatan, Tapin Utara, lokpaikat, bungur, piani, bakarangan, kab. Tapin;
346. 1 (satu) bundel hasil verifikasi data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. Bintang ara, upau, muara harus, banua lawas, kelua, pugaan tanta, kab. Tabalong;

Hal. 28 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347. 1 (satu) bundel hasil verifikasi data dan dokumen bantuan sosial masyarakatan tahun 2010 kec. Tanjung, murung pudak, jaro, muara uya, haruai, kab. Tabalong;
348. 1 (satu) bundel hasil verifikasi data dan dokumen bantuan sosial masyarakatan tahun 2010 kec. Marabahan, jejangkit, mekar sari, wanaraya, bakumpai, kab. Batola;
349. 1 (satu) bundel hasil verifikasi data dan dokumen bantuan sosial masyarakatan tahun 2010 kec. Tamban, kuripan, rantau bedauh, kab. Batola;
350. 1 (satu) bundel hasil verifikasi data dan dokumen bantuan sosial masyarakatan tahun 2010 kec. Belawang, anjir pasar, anjir muara, mandastana, kab. Batola;
351. 1 (satu) bundel hasil verifikasi data dan dokumen bantuan sosial masyarakatan tahun 2010 kec. Tabukan, cerbon, alalak, kab. Batola;
352. 1 (satu) bundel hasil verifikasi data dan dokumen bantuan sosial masyarakatan tahun 2010 kec. Tabunganen, barambai, kab. Batola;
353. 1 (satu) bundel hasil verifikasi data dan dokumen bantuan sosial masyarakatan tahun 2010 kec. Angsana, sei loban, kusan hilir, kab. Tanah Bumbu;
354. 1 (satu) bundel hasil verifikasi data dan dokumen bantuan sosial masyarakatan tahun 2010 kec. Simpang empat, karang bintang, mentewe, kusan hulu, satui, kab. Tanah Bumbu;
355. 1 (satu) bundel hasil verifikasi data dan dokumen bantuan sosial masyarakatan tahun 2010 kec. Lampihong, awayan, batumandi, halong, juai, paringin kota, paringin selatan, tebing tinggi, kab. Balangan;
356. 1 (satu) bundel hasil verifikasi data dan dokumen bantuan sosial masyarakatan tahun 2010 kec. Pulau laut utara, pulau laut timur, kab. Kotabaru;
357. 1 (satu) bundel data/dokumen dan hasil verifikasi dana bantuan sosial masyarakatan pelaihari (TALA);

Hal. 29 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358. 1 (satu) bundel data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010 kec. Barabai, kab. Hulu sungai tengah;

359. 1 (satu) bundel kwitansi bulan Maret tahun 2010;

360. 1 (satu) bundel kwitansi bulan April tahun 2010;

361. 1 (satu) bundel kwitansi bulan Mei tahun 2010;

362. 1 (satu) bundel kwitansi bulan Juli tahun 2010;

363. 1 (satu) bundel kwitansi bulan September tahun 2010;

364. 1 (satu) bundel kwitansi bulan November tahun 2010;

365. 1 (satu) bundel kwitansi bulan Desember tahun 2010;

Penetapan Nomor 78/Persit/TPK/2013/PN.BJM tanggal 28 Oktober 2013

atas benda berupa:

LAMPIRAN DAFTAR BARANG SITAAN

No.	Nama barang	Jumlah	Keterangan
1.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010 Nomor BKU 02 s/d 26	25 berkas	Lengkap
2.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010 Nomor BKU 164 s/d 184	21 berkas	Lengkap
3.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010 Nomor BKU 143 s/d 163	21 berkas	Lengkap
4.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 121 s/d 134 Nomor BKU 136 s/d 139 Nomor BKU 141 s/d 142	20 berkas	Tidak Lengkap Nomor BKU 135, 140 tidak ada
5.	<ul style="list-style-type: none"> Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010 Nomor BKU 103 s/d 120 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010 	18 berkas	Lengkap

Hal. 30 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



	Nomor BKU 410 • Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan Tahun 2010 Nomor BKU 704		
6.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010 Nomor BKU 324 Nomor BKU 327 s/d 329 Nomor BKU 331 s/d 335 Nomor BKU 338 s/d 345	17 berkas	Tidak Lengkap Nomor BKU 325, 326, 330, 336, 337 tidak ada
7.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010 Nomor BKU 346 s/d 349 Nomor BKU 351 s/d 353 Nomor BKU 356 Nomor BKU 358 s/d 361	12 berkas	Tidak Lengkap Nomor BKU 350, 354, 355, 357 tidak ada
8.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010 Nomor BKU 206 s/d 230	25 berkas	Lengkap
9.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010 Nomor BKU 185 s/d 205	21 berkas	Lengkap
10.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010 Nomor BKU 253 s/d 275	23 berkas	Lengkap
11.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010 Nomor BKU 231 s/d 252	22 berkas	Lengkap
12.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 530 s/d 557 Nomor BKU 559 s/d 670	140 berkas	Tidak Lengkap Nomor BKU 558 tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 672 Nomor BKU 674	2 berkas	Lengkap
14.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010 Nomor BKU 88 Nomor BKU 96	2 berkas	Lengkap
15.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 689 Nomor BKU 690	2 berkas	Lengkap
16.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 178 s/d 180	3 berkas	Lengkap
17.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 1105	1 berkas	Lengkap
18.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 928	1 berkas	Lengkap
19.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Juli 2010 Nomor BKU 632	1 berkas	Lengkap
20.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010 Nomor BKU 441	1 berkas	Lengkap
21.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 833	1 berkas	Lengkap
22.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 118	1 berkas	Lengkap

Hal. 32 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



23.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 203	1 berkas	Lengkap
24.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 710 s/d 721	11 berkas	Lengkap
25.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 662 Nomor BKU 664 s/d 671	9 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 663
26.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 641 s/d 661	21 berkas	Lengkap
27.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 597 s/d 618	22 berkas	Lengkap
28.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 573 s/d 596	24 berkas	Lengkap
29.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 553 s/d 574	22 berkas	Lengkap
30.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 531 s/d 552	22 berkas	Lengkap
31.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 509 s/d 530	22 berkas	Lengkap
32.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 486 s/d 508	22 berkas	Lengkap
33.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 462 s/d 485	24 berkas	Lengkap
34.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 440 s/d 461	22 berkas	Lengkap
35.	Proposal beserta kwitansi tanda terima	24 berkas	Lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 416 s/d 439		
36.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 395 s/d Nomor BKU 407 Nomor BKU 409 s/d 415	9 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 408
37.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 373 s/d No BKU 376 Nomor BKU 378 s/d 394	19 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 377
38.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 350 s/d 372	23 berkas	Lengkap
39.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 326 s/d 349	24 berkas	Lengkap
40.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 303 s/d 325	23 berkas	Lengkap
41.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 281 s/d 302	22 berkas	Lengkap
42.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 263 s/d 280	18 berkas	Lengkap
43.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 241 s/d 262	22 berkas	Lengkap
44.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 218 s/d 240	23 berkas	Lengkap
45.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 196 s/d 220 Nomor BKU 204 s/d 214 Nomor BKU 216 s/d 217	38 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 203 dan 215
46.	Proposal beserta kwitansi tanda terima	21 berkas	Tidak lengkap Nomor

Hal. 34 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



	bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 174 s/d 177 Nomor BKU 179 s/d 195		BKU 178
47.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 153 s/d 173	21 berkas	Lengkap
48.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 132 No.BKU 134 s/d 147 Nomor BKU 149 Nomor BKU 151 s/d 152	18 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 133, 148, 150
49.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 111 s/d 131	21 berkas	Lengkap
50.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 92 s/d 110	19 berkas	Lengkap
51.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 74 s/d 91	18 berkas	Lengkap
52.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 686 s/d 688 Nomor BKU 691 s/d 696 Nomor BKU 699 Nomor BKU 704	11 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 689,690,697,698,700, 703
53.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 673 Nomor BKU 675 s/d 685	12 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 674
54.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010 Nomor BKU 410 Nomor BKU 412 Nomor BKU 414 s/d 416 Nomor BKU 422 s/d 424	8 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 411,413,417,418,419, 420,421.
55.	Proposal beserta kwitansi tanda terima	3 berkas	Lengkap

Hal. 35 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bansos kemasyarakatan bulan September 2010 Nomor BKU 304 s/d 306		
56.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010 Nomor BKU 231 s/d 233 Nomor BKU 240	4 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 234,235,236,237,238, 239
57.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010 Nomor BKU 210 Nomor BKU 212 Nomor BKU 222 Nomor BKU 224 Nomor BKU 227 Nomor BKU 229 s/d 230	7 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 211,213 s/d 221, 223,225 s/d 226,228.
58.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010 Nomor BKU 365 s/d 368	4 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 366,367.
59.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010 Nomor BKU 304 s/d 306	3 berkas	Lengkap
60.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010 Nomor BKU 499 s/d 500	2 berkas	Lengkap
61.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010 Nomor BKU 364 381 s/d 383	3 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 365 s/d 380
62.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010 Nomor BKU 429 Nomor BKU 432 s/d 433	6 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 430,431,434 s/d 437, 439 s/d 442, 444,445.

Hal. 36 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Nomor BKU 438 Nomor BKU 443 Nomor BKU 446		
63.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 475 s/d 498	24 berkas	Lengkap.
64.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 453 s/d 474	22 berkas	Lengkap.
65.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 431 Nomor BKU 434,435 Nomor BKU 439 Nomor BKU 442 Nomor BKU 444,445 Nomor BKU 447 s/d 452	13 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 429,430,432.433,438, 440,441,443,446.
66.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 408 s/d 409 Nomor BKU 411 Nomor BKU 413 Nomor BKU 417 s/d 421 Nomor BKU 425 s/d 427	12 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 410,412,414,415,416, 422,423,424,428
67.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 386 s/d 407	22 berkas	Lengkap
68.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 363 Nomor BKU 366,367 Nomor BKU 369 s/d 380 Nomor BKU 383 s/d 385	18 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 364,365,368,381, 382



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 339 s/d 362	24 berkas	Lengkap
70.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 316 s/d 338	23 berkas	Lengkap
71.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 294 s/d 303 Nomor BKU 307 s/d 315	19 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 304,305,306
72.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 276 s/d 293	18 berkas	Lengkap
73.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 254 s/d 275	22 berkas	Lengkap
74.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 232 Nomor BKU 239 Nomor BKU 242 s/d 247 Nomor BKU 250 s/d 253	12 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 234 s/d 238,240,241,248, 249
75.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 211 Nomor BKU 213 Nomor BKU 215 Nomor BKU 218,219	5 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 209,210,212,214,216, 217,220 s/d 230
76.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 187 s/d 208	22 berkas	Lengkap

Hal. 38 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 166 s/d 178	13 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 179
78.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 180 s/d 186	7 berkas	Lengkap
79.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 145 s/d 165	21 berkas	Lengkap
80.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 124 s/d 144	21 berkas	Lengkap
81.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 105 s/d 123	19 berkas	Lengkap
82.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 87 Nomor BKU 91 s/d 95 Nomor BKU 97 s/d 104	14 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 88 s/d 90, 96
83.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010 Nomor BKU 27 s/d 53	27 berkas	lengkap
84.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 671 s/d 689 Nomor BKU 690 s/d 708	38 berkas	lengkap
85.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 709 s/d 726 Nomor BKU 727 s/d 745	37 berkas	lengkap
86.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010	34 berkas	lengkap

Hal. 39 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Nomor BKU 746 s/d 762 Nomor BKU 763 s/d 779		
87.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 780 s/d 798 Nomor BKU 779 s/d 816	57 berkas	Lengkap
88.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 817 s/d 834 Nomor BKU 835 s/d 849	33 berkas	lengkap
89.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 590 Nomor BKU 673 Nomor BKU 675 s/d 688 Nomor BKU 691 s/d 696 Nomor BKU 699 s/d 702 Nomor BKU 727 s/d 738 Nomor BKU 742 s/d 745 Nomor BKU 998 s/d 999 Nomor BKU 1003 Nomor BKU 1018	46 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 738 s/d 741, 995 s/d 997, 1000 s/d 1001, 1004, 1006 s/d 1017, 1019 s/d 1024
90.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 850 s/d 869 Nomor BKU 870 s/d 886	37 berkas	lengkap
91.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 887 s/d 904 Nomor BKU 905 s/d 921	35 berkas	lengkap
92.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 922 s/d 938 Nomor BKU 939 s/d 956	35 berkas	lengkap
93.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 976 s/d 994	19 berkas	lengkap
94.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010	30 berkas	lengkap



	Nomor BKU 995 s/d 1015 Nomor BKU 1016 s/d 1024		
95.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 137 s/d 164	28 berkas	lengkap
96.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 165 s/d 173 Nomor BKU 176 s/d 190	30 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 174 s/d 175
97.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 690 s/d 697 Nomor BKU 699 Nomor BKU 705 s/d 708 Nomor BKU 709 s/d 726 Nomor BKU 671 s/d 689	50 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 698, 700 s/d 704
98.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 440 s/d 461	22 berkas	lengkap
99.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 619 s/d 640	22 berkas	lengkap
100.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 74 s/d 91 Nomor BKU 92 s/d 110	37 berkas	lengkap
101.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 462 s/d 485	24 berkas	Tidak lengkap
102.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010 Nomor BKU 54 s/d 81	28 berkas	Lengkap
103.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010 Nomor BKU 82 s/d 108	27 berkas	Lengkap
104.	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010 Nomor BKU 109 s/d 113 Nomor BKU 116 s/d 127	25 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 114 s/d 115, 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BKU 129 s/d 136		
Jumlah	2145	berkas

LAMPIRAN DAFTAR BARANG SITAAN
AMPRAHAN II

No.	Nama	Tanggal	Jumlah Uang
1.	ND. H Muhidin	15 Maret 2010	Rp126.000.000
2.	H. Asmara yanto, SH	9 Maret 2010	Rp100.000.000
3.	Ir. Burhanudin	15 Maret 2010	Rp125.000.000
4.	Drs. Riduan Ms	24 Maret 2010	Rp150.000.000
5.	Rudiansyah. SH	3 Februari	Rp100.000.000
6.	Drs. Syarifuddin Sabang	Maret 2010	Rp120.000.000
7.	Mansyah Sabri/Puar Junaidi	Maret 2010	Rp208.500.000
8.	H. Puar Junaidi, S.sos	Maret 2010	Rp187.000.000
9.	Drs. Midi Yusi	-	Rp46.250.000
10.	Nasrullah, S.pd.I	-	Rp117.000.000
11.	H. Muhammad Nor	31 Maret 2010	Rp100.000.000
12.	H. Abdul Latif Hanafiah	2 Maret 2010	Rp75.000.000
13.	Drs. H. Abdul Munasib Halike	26 Maret 2010	Rp103.000.000
14.	Akhmad Jazuli, S.Ked. M.Ap	Maret 2010	Rp98.500.000
15.	Drs. H. Budiman Mustafa	Maret 2010	Rp114.200.000
16.	Husaini Suni, Lc	Februari 2010	Rp115.500.000
17.	Zulkifli Haqan, SH. MH	Maret 2010	Rp40.000.000
18.	H. Ali Baderun	Maret 2010	Rp93.000.000
19.	Ali Akbar Wijaya, ST	Maret 2010	Rp66.000.000
20.	M. Husaini, SE.MM	April 2010	Rp200.000.000
21.	Dra. Hj. Hera Farina, MM	Maret 2010	Rp100.000.000
22.	Zulkifli Haqan, SH. MH	2 Maret 2010	Rp60.000.000
23.	H.M. Yusri. S.ses	-	Rp100.000.000
24.	H. Muhaimin, SH. MH. Mkn	Maret 2010	Rp10.000.000
25.	Habib Ali Khaidar Alkaff	-	Rp84.000.000
26.	Fathurrahman. S.Pd.I	-	Rp210.000.000
27.	Drs. Midy Yusi	-	Rp62.500.000
28.	H. Zainal Arifin. SH. MH	-	Rp122.000.000
29.	Nasrullah AR. S.Pd.I	-	Rp234.750.000
30.	H. Ansor Ramdhan M.Fil.I	-	Rp192.000.000
31.	H.M. Husaini Aliman. SE, MM	Februari 2010	Rp100.000.000

Hal. 42 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	H. Mulyadi Mangin, SE	-	Rp100.000.000
33.	M. Husaini. SE.MM	25 Februari 2010	Rp100.000.000
34.	M. Rafi'ie Muksin. S.Aq	-	Rp221.000.000

LAMPIRAN DAFTAR BARANG SITAAN AMPRAHAN 1 BANSOSMAS TAHUN 2010

Jumlah: Rp1444.250.000,00

Rincian:

1. ND. Nomor 451/02/Agm/Kesra
Tanggal 23 Februari 2010
Jumlah: Rp74.000.000,00 (Habib Ali)
2. ND. Nomor 451/03/Agm/Kesra
Tanggal 23 Februari 2010
Jumlah: Rp235.000.000,00 (Fatur)
3. ND. Nomor 451/04/Agm/Kesra
Tanggal 23 Februari 2010
Jumlah: Rp62.500.000 (Midi Yusi/P3)
4. ND. Nomor 451/05/Agm/Kesra
Tanggal 23 Februari 2010
Jumlah: Rp112.000.000 (Zainal/P3)
5. ND. Nomor 451/06/Agm/Kesra
Tanggal 25 Februari 2010
Jumlah: Rp142.750.000 (Nasrullah/P3)
6. ND. Nomor 451/07/Agm/Kesra
Tanggal 23 Februari 2010
Jumlah: Rp187.000.000 (Ansor. R/P3)
7. ND. Nomor 451/08/Agm/Kesra
Tanggal 25 Februari 2010
Jumlah: Rp100.000.000 (Husaini/PAN)
8. ND. Nomor 451/09/Agm/Kesra
Tanggal 9 Maret 2010
Jumlah: Rp102.000.000 (Mulyadi/KBNR)
9. ND. Nomor 451/10/Agm/Kesra
Tanggal Maret 2010
Jumlah: Rp100.000.000 (M. Husaini/Demokrat)
10. ND. Nomor 451/01/Agm/Kesra
Tanggal 23 Februari 2010
Jumlah: Rp231.000.000 (Rafi'i. M)
11. ND. Nomor 451/24/Agm/Kesra

Hal. 43 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 9 Maret 2010

Jumlah: Rp100.000.000 (Hermansyah/PDIP)

LAMPIRAN DAFTAR BARANG SITAAN

AMPRAHAN BANSOSMAS: 3 = Rp4.244.250.000;

1. ND. Nomor 451/38/Agm/Kesra
Tanggal 21 April 2010
Jumlah: Rp100.000.000
2. ND. Nomor 451/39/Agm/Kesra
Tanggal 21 April 2010
Jumlah: Rp155.000.000
3. ND. Nomor 451/41/Agm/Kesra
Tanggal 21 April 2010
Jumlah: Rp51.000.000
4. ND. Nomor 451/42/Agm/Kesra
Tanggal 26 April 2010
Jumlah: Rp64.000.000
5. ND. Nomor 451/43/Agm/Kesra
Tanggal 26 April 2010
Jumlah: Rp90.000.000
6. ND. Nomor 451/44/Agm/Kesra
Tanggal 30 April 2010
Jumlah: Rp100.000.000
7. ND. Nomor 451/45/Agm/Kesra
Tanggal 27 April 2010
Jumlah: Rp96.000.000
8. ND. Nomor 451/46/Agm/Kesra
Tanggal 19 April 2010
Jumlah: Rp85.000.000
9. ND. Nomor 451/47/Agm/Kesra
Tanggal 19 April 2010
Jumlah: Rp173.500.000
10. ND. Nomor 451/48/Agm/Kesra
Tanggal 30 April 2010
Jumlah: Rp145.000.000
11. ND. Nomor 451/49/Agm/Kesra
Tanggal 4 Mei 2010
Jumlah: Rp192.000.000
12. ND. Nomor 451/50/Agm/Kesra

Hal. 44 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 Mei 2010
Jumlah: Rp110.000.000
13. ND. Nomor 451/51/Agm/Kesra
Tanggal 6 Mei 2010
Jumlah: Rp120.000.000
14. ND. Nomor 451/52/Agm/Kesra
Tanggal 6 Mei 2010
Jumlah: Rp130.000.000
15. ND. Nomor 451/53/Agm/Kesra
Tanggal 7 Mei 2010
Jumlah: Rp17.500.000
16. ND. Nomor 451/54/Agm/Kesra
Tanggal 7 Mei 2010
Jumlah: Rp57.500.000
17. ND. Nomor 451/55/Agm/Kesra
Tanggal 7 Mei 2010
Jumlah: Rp177.000.000
18. ND. Nomor 451/56/Agm/Kesra
Tanggal 7 Mei 2010
Jumlah: Rp171.000.000
19. ND. Nomor 451/57/Agm/Kesra
Tanggal 11 Mei 2010
Jumlah: Rp96.750.000
20. ND. Nomor 451/58/Agm/Kesra
Tanggal 11 Mei 2010
Jumlah: Rp105.000.000
21. ND. Nomor 451/59/Agm/Kesra
Tanggal 11 Mei 2010
Jumlah: Rp56.000.000
22. ND. Nomor 451/60/Agm/Kesra
Tanggal 11 Mei 2010
Jumlah: Rp140.000.000
23. ND. Nomor 451/61/Agm/Kesra
Tanggal 11 Mei 2010
Jumlah: Rp125.000.000
24. ND. Nomor 451/62/Agm/Kesra
Tanggal 11 Mei 2010
Jumlah: Rp45.000.000
25. ND. Nomor 451/63/Agm/Kesra

Hal. 45 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Mei 2010
Jumlah: Rp106.500.000
26. ND. Nomor 451/64/Agm/Kesra
Tanggal 20 Mei 2010
Jumlah: Rp100.000.000
27. ND. Nomor 451/65/Agm/Kesra
Tanggal 18 Mei 2010
Jumlah: Rp38.000.000
28. ND. Nomor 451/66/Agm/Kesra
Tanggal 20 Mei 2010
Jumlah: Rp45.000.000
29. ND. Nomor 451/67/Agm/Kesra
Tanggal 20 Mei 2010
Jumlah: Rp115.000.000
30. ND. Nomor 451/68/Agm/Kesra
Tanggal 18 Mei 2010
Jumlah: Rp151.000.000
31. ND. Nomor 451/69/Agm/Kesra
Tanggal 20 Mei 2010
Jumlah: Rp104.000.000
32. ND. Nomor 451/70/Agm/Kesra
Tanggal 20 Mei 2010
Jumlah: Rp25.000.000
33. ND. Nomor 451/71/Agm/Kesra
Tanggal 18 Mei 2010
Jumlah: Rp180.000.000
34. ND. Nomor 451/72/Agm/Kesra
Tanggal 20 Mei 2010
Jumlah: Rp175.000.000
35. ND. Nomor 451/73/Agm/Kesra
Tanggal Mei 2010
Jumlah: Rp175.000.000
36. ND. Nomor 451/75/Agm/Kesra
Tanggal 20 Mei 2010
Jumlah: Rp200.000.000
37. ND. Nomor 451/77/Agm/Kesra
Tanggal 20 Mei 2010
Jumlah: Rp53.750.000

Hal. 46 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



LAMPIRAN DAFTAR BARANG SITAAN
AMPRAHAN III

No.	Nama	Tanggal	Fraksi	Jumlah Uang
1.	Ir. Gusti Perdana Kusuma	April 2010	Golkar	Rp100.000.000
2.	Ir. Soegeng Soe santo	29 Maret 2010	PAN	Rp155.000.000
3.	H. Zainal Arifin, SH., MH.,	9 April 2010	PPP	Rp51.000.000
4.	Hj. Ferita Hariyani, SE	Maret 2010	Demokrat	Rp64.000.000
5.	Hj. Hariyatie	5 April 2010	KBNR	Rp90.000.000
6.	Dra. Maitri Puspa Kuesasih	April 2010	PAN	Rp100.000.000
7.	M. Rafi'l Muksin, S.Ag	Juni 2010	PPP	Rp96.000.000
8.	H. Zaini, SH. MH. Mkn	20 April 2010	PDIP	Rp85.000.000
9.	H. Gusti Rudiansyah, SmHK	April 2010	Golkar	Rp173.500.000
10.	Ir. Soegeng Soesanto	27 April 2010	PAN	Rp145.000.000
11.	Nasib Alamsyah	April 2010	Golkar	Rp192.000.000
12.	H. A. Bisung	Maret 2010	Demokrat	Rp110.000.000
13.	Novianto	20 April 2010	PDIP	Rp120.000.000
14.	H. Soeyono	21 April 2010	PDIP	Rp130.000.000
15.	H. Abdul Latif Hanafiah, Msc	12 April	KBNR	Rp17.500.000
16.	H. Puar Junaidi, S.Sos.,	Mei 2010	Golkar	Rp57.500.000
17.	H. Karno HA	Mei 2010	Golkar	Rp177.000.000
18.	Habib Said Hasan Al Habsyie, Bsc	3 Mei 2010	KPKS	Rp171.000.000
19.	Hj. Rosnani, SH	April 2010	KBNR	Rp96.750.000
20.	Ali Akbar Wijaya, ST	April 2010	-	Rp105.000.000
21.	Riduansyah, SH	22 Maret 2010	PBR	Rp56.000.000
22.	Dr. H. Bardiansyah, MM.,	Maret 2010	Golkar	Rp140.000.000
23.	Ir. H. Hasmy Fadillah Akbar, MM.,	Maret 2010	Golkar	Rp125.000.000
24.	Muh Ihsanuddin	Maret 2010	PKS	Rp45.000.000
25.	Ibnu Sina, S.pi	Maret 2010	PKS	Rp106.500.000
26.	Hermansyah	15 Juni 2010	PDIP	Rp100.000.000
27.	H. Ansor Ramadhan, M. Fil.I	-	PPP	Rp18.000.000
28.	H. Zainal Arifin, SH., MH.,	-	PPP	Rp45.000.000
29.	Susan, Sh. MH	April 2010	Golkar	Rp115.000.000
30.	Hj. Rosnani, SH	Mei 2010	KBNR	Rp151.000.000
31.	Nasib Alamsyah	April 2010	Golkar	Rp104.000.000
32.	Susan, SH. MH	Mei 2010	Golkar	Rp25.000.000
33.	Drs. Syarifuddin Sabang	Mei 2010	Golkar	Rp180.000.000
34.	Dra. Hj. Hera Farina, MM	Mei 2010	Demokrat	Rp175.000.000
35.	Fathurrahman, S.Pd.I	Juni 2010	-	Rp65.000.000

Hal. 47 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	H. Muhammad Nur	-	Gerindra	Rp200.000.000
37.	H. M. Husaini Aliman, SE	-	PAN	Rp100.000.000

LAMPIRAN DAFTAR BARANG SITAAN

FotoCopy Cek Bank BPD Kal-Sel

- Nomor AH. 030487 tanggal 18 Maret 2010
Rp1.444.250.000
- Nomor AH. 061684 tanggal 21 April 2010
Rp2.848.950.000
- Nomor AH. 061680 tanggal 21 April 2010
Rp100.000.000
- Nomor AH 061692 tanggal 26 Mei 2010
Rp4.224.250.000
Yang telah mendapat legalisir

DAFTAR BARANG BUKTI

TANDA TERIMA NOTA DINAS GUBERNUR (ASLI)

AMPRAHAN YANG KE-4

TAHUN 2010

No.	Bulan	Nomor Nota Dinas	Amprahan yang ke 4 Asli/tidak asli
1	2	3	4
1.	17 Juni 2010	451/78/Agm/Kesra	Asli
2.	18 Juni 2010	451/79/Agm/Kesra	Asli
3.	18 Juni 2010	451/80/Agm/Kesra	Asli
4.	22 Juni 2010	451/81/Agm/Kesra	Asli
5.	28 Juni 2010	451/82/Agm/Kesra	Asli
6.	28 Juni 2010	451/83/Agm/Kesra	Asli
7.	29 Juni 2010	451/84/Agm/Kesra	Asli
8.	29 Juni 2010	451/85/Agm/Kesra	Asli
9.	30 Juni 2010	451/86/Agm/Kesra	Asli
10.	01 Juli 2010	451/87/Agm/Kesra	Asli
11.	05 Juli 2010	451/88/Agm/Kesra	Asli
12.	05 Juli 2010	451/89/Agm/Kesra	Asli
13.	05 Juli 2010	451/90/Agm/Kesra	Asli
14.	05 Juli 2010	451/91/Agm/Kesra	Asli
15.	05 Juli 2010	451/92/Agm/Kesra	Asli
16.	05 Juli 2010	451/93/Agm/Kesra	Asli

Hal. 48 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	05 Juli 2010	451/94/Agm/Kesra	Asli
18.	05 Juli 2010	451/95/Agm/Kesra	Asli
19.	05 Juli 2010	451/96/Agm/Kesra	Asli
20.	05 Juli 2010	451/97/Agm/Kesra	Asli
21.	05 Juli 2010	451/98/Agm/Kesra	Asli
22.	05 Juli 2010	451/99/Agm/Kesra	Asli
23.	05 Juli 2010	451/100/Agm/Kesra	Asli
24.	05 Juli 2010	451/101/Agm/Kesra	Asli
25.	05 Juli 2010	451/102/Agm/Kesra	Asli
26.	05 Juli 2010	451/103/Agm/Kesra	Asli
27.	05 Juli 2010	451/104/Agm/Kesra	Asli
28.	05 Juli 2010	451/105/Agm/Kesra	Asli
29.	05 Juli 2010	451/106/Agm/Kesra	Asli
30.	05 Juli 2010	451/107/Agm/Kesra	Asli
31.	05 Juli 2010	451/108/Agm/Kesra	Asli
32.	05 Juli 2010	451/109/Agm/Kesra	Asli

DAFTAR BARANG BUKTI
TANDA TERIMA NOTA DINAS GUBERNUR (ASLI)
AMPRAHAN YANG KE-5
TAHUN 2010

No.	Bulan	Nomor Nota Dinas	Amprahan yang ke 5 Asli/tidak asli
1	2	3	4
1.	20 Agustus 2010	451/110/Agm/Kesra	Asli
2.	20 Agustus 2010	451/111/Agm/Kesra	Asli
3.	20 Agustus 2010	451/112/Agm/Kesra	Asli
4.	30 Agustus 2010	451/113/Agm/Kesra	Asli
5.	30 Agustus 2010	451/114/Agm/Kesra	Asli
6.	30 Agustus 2010	451/115/Agm/Kesra	Asli
7.	30 Agustus 2010	451/116/Agm/Kesra	Asli
8.	30 Agustus 2010	451/117/Agm/Kesra	Asli
9.	31 Agustus 2010	451/118/Agm/Kesra	Asli
10.	01 September 2010	451/119/Agm/Kesra	Asli
11.	06 September 2010	451/120/Agm/Kesra	Asli
12.	06 Agustus 2010	451/121/Agm/Kesra	Asli
13.	06 September 2010	451/122/Agm/Kesra	Asli
14.	06 September 2010	451/123/Agm/Kesra	Asli

Hal. 49 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	06 September 2010	451/124/Agm/Kesra	Asli
16.	06 September 2010	451/125/Agm/Kesra	Asli
17.	06 September 2010	451/126/Agm/Kesra	Asli
18.	17 September 2010	451/127/Agm/Kesra	Asli
19.	17 September 2010	451/128/Agm/Kesra	Asli
20.	17 September 2010	451/129/Agm/Kesra	Asli
21.	17 September 2010	451/130/Agm/Kesra	Asli
22.	17 September 2010	451/131/Agm/Kesra	Asli
23.	17 September 2010	451/132/Agm/Kesra	Asli
24.	17 September 2010	451/133/Agm/Kesra	Asli
25.	17 September 2010	451/134/Agm/Kesra	Asli
26.	17 September 2010	451/135/Agm/Kesra	Asli
27.	17 September 2010	451/136/Agm/Kesra	Asli
28.	17 September 2010	451/137/Agm/Kesra	Asli
29.	17 September 2010	451/138/Agm/Kesra	Asli
30.	17 September 2010	451/139/Agm/Kesra	Asli
31.	17 September 2010	451/140/Agm/Kesra	Asli

DAFTAR BARANG BUKTI

TANDA TERIMA NOTA DINAS GUBERNUR (ASLI)

AMPRAHAN YANG KE-6

TAHUN 2010

No.	Bulan	Nomor Nota Dinas	Amprahan yang ke 6 Asli/tidak asli
1	2	3	4
1.	25 Oktober 2010	451/141/Agm/Kesra	Asli
2.	25 Oktober 2010	451/142/Agm/Kesra	Asli
3.	25 Oktober 2010	451/143/Agm/Kesra	Asli
4.	25 Oktober 2010	451/144/Agm/Kesra	Asli
5.	25 Oktober 2010	451/145/Agm/Kesra	Asli
6.	26 Oktober 2010	451/146/Agm/Kesra	Asli
7.	01 November 2010	451/147/Agm/Kesra	Asli
8.	01 November 2010	451/148/Agm/Kesra	Asli
9.	01 November 2010	451/149/Agm/Kesra	Asli
10.	01 November 2010	451/150/Agm/Kesra	Asli
11.	01 November 2010	451/151/Agm/Kesra	Asli
12.	01 November 2010	451/152/Agm/Kesra	Asli
13.	02 November 2010	451/155/Agm/Kesra	Asli

Hal. 50 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	02 November 2010	451/156/Agm/Kesra	Asli
15.	03 November 2010	451/159/Agm/Kesra	Asli
16.	03 November 2010	451/160/Agm/Kesra	Asli
17.	02 November 2010	451/161/Agm/Kesra	Asli
18.	02 November 2010	451/162/Agm/Kesra	Asli
19.	02 November 2010	451/163/Agm/Kesra	Asli
20.	03 November 2010	451/164/Agm/Kesra	Asli
21.	November 2010	451/165/Agm/Kesra	Asli
22.	November 2010	451/167/Agm/Kesra	Asli
23.	November 2010	451/168/Agm/Kesra	Asli
24.	November 2010	451/169/Agm/Kesra	Asli
25.	November 2010	451/170/Agm/Kesra	Asli
26.	November 2010	451/171/Agm/Kesra	Asli
27.	November 2010	451/172/Agm/Kesra	Asli
28.	November 2010	451/173/Agm/Kesra	Asli
29.	November 2010	451/174/Agm/Kesra	Asli
30.	November 2010	451/175/Agm/Kesra	Asli
31.	November 2010	451/176/Agm/Kesra	Asli
32.	November 2010	451/177/Agm/Kesra	Asli
33.	Oktober 2010	451/178/Agm/Kesra	Asli
34.	November 2010	451/179/Agm/Kesra	Asli
35.	November 2010	451/180/Agm/Kesra	Asli
36.	November 2010	451/181/Agm/Kesra	Asli
37.	November 2010	451/182/Agm/Kesra	Asli
38.	November 2010	451/183/Agm/Kesra	Asli
39.	November 2010	451/184/Agm/Kesra	Asli
40.	November 2010	451/185/Agm/Kesra	Asli
41.	November 2010	451/186/Agm/Kesra	Asli
42.	November 2010	451/187/Agm/Kesra	Asli
43.	November 2010	451/188/Agm/Kesra	Asli
44.	November 2010	451/189/Agm/Kesra	Asli
45.	November 2010	451/190/Agm/Kesra	Asli
46.	November 2010	451/191/Agm/Kesra	Asli
47.	November 2010	451/192/Agm/Kesra	Asli
48.	November 2010	451/193/Agm/Kesra	Asli
49.	November 2010	451/196/Agm/Kesra	Asli
50.	November 2010	451/197/Agm/Kesra	Asli
51.	November 2010	451/198/Agm/Kesra	Asli

Hal. 51 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.	November 2010	451/199/Agm/Kesra	Asli
53.	November 2010	451/200/Agm/Kesra	Asli

LAMPIRAN DAFTAR BARANG SITAAN
 USULAN BANSOS DARI ANGGOTA DEWAN DPRD
 PROP. KALSEL TA. 2010 YANG ASLI
 UNTUK AMPRAHAN KE-6

NO	NOMOR NOTA DINAS	TANGGAL	FRAKSI	Nama anggota Dewan
1	2	3	4	5
1.	451/206/Agm/Kesra	8 November 2010	PBR	Drs. H. Riduan MS
2.	451/187/Agm/Kesra	Oktober 2010	PBR	Ir. Burhanudin
3.	451/204/Agm/Kesra	Agustus 2010	PBR	H. Muhidin
4.	451/174/Agm/Kesra	02 November 2010	PBR	H. Asmara Yanto, SH
5.	451/176/Agm/Kesra	Juli 2010	PBR	H. Muhidin
6.	451/204/Agm/Kesra	Agustus 2010	PBR	H. Muhidin
7.	451/195/Agm/Kesra	Oktober 2010	Golkar	H. M. Karno HA
8.	451/185/Agm/Kesra	Oktober 2010	Golkar	Susan, SH. MH
9.	451/184/Agm/Kesra	Oktober 2010	Golkar	H. M. Karno HA
10.	451/178/Agm/Kesra	Oktober 2010	Golkar	H. M. Karno HA
11.	451/171/Agm/Kesra	Oktober 2010	Golkar	Drs. H. Badriansyah, MM
12.	451/166/Agm/Kesra	-	Golkar	Drs. H. Badriansyah, MM
13.	451/163/Agm/Kesra	Oktober 2010	Golkar	Drs. H. Mansyah Sabri
14.	451/162/Agm/Kesra	Oktober 2010	Golkar	Ir. H. Hasmy Fadillah akbar, MM
15.	451/166/Agm/Kesra	Oktober 2010	Golkar	Susan, SH. MM
16.	451/155/Agm/Kesra	Oktober 2010	Golkar	Drs. H. Badriansyah, MM
17.	451/152/Agm/Kesra	Oktober 2010	Golkar	H. Puar Junaidi, S.Sos
18.	451/150/Agm/Kesra	Oktober 2010	Golkar	Drs. Syarifuddin sabang
19.	451//Agm/Kesra	Oktober 2010	Golkar	Drs. Syarifuddin sabang
20.	451/149/Agm/Kesra	Oktober 2010	Golkar	H. Gusti Rudiansyah, SmHK
21.	451/143/Agm/Kesra	Agustus 2010	Golkar	Kol. TNI (Pur) Nasib Alamsyah
22.	451/142/Agm/Kesra	Agustus 2010	Golkar	H. Gusti Rudiansyah, SmHK

Hal. 52 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	451/167/Agm/Kesra		PPP	
24.	451/196/Agm/Kesra	Desember 2010	PPP	H. Zainal Arifin, SH.MH.
25.	451/197/Agm/Kesra		PPP	-
26.	451/148/Agm/Kesra	-	PPPIR	H. Muhammad Nur
27.	451/188/Agm/Kesra	01 November 2010	KBNR	Drs. H. A. Latief Hanafiah, M. Sc
28.	451/175/Agm/Kesra	-	PKB	H. Mulyadi mangin, SE
29.	451/156/Agm/Kesra	Oktober 2010	KBNR	Hj. Rosnani, SH
30.	451/153/Agm/Kesra	20 November 2010	KBNR	Hj. Hariyatie
31.	451/147/Agm/Kesra	26 Oktober 2010	-	Drs. Budiman Mustafa
32.	451/200/Agm/Kesra	November 2010	PKS	Ibnu Sina, S. Pi
33.	451/183/Agm/Kesra	Oktober 2010	-	HUSAINI Suni, Lc
34.	451/199/Agm/Kesra	November 2010	PKS	Habib Said Al-Habsyi, Bsc
35.	451/182/Agm/Kesra	28 Oktober 2010	PKS	Muh. Ihsanuddin.
36.	451/181/Agm/Kesra	28 Oktober 2010	PKS	Muh. Ihsanuddin.
37.	451/179/Agm/Kesra	November 2010	PKS	Ibnu Sina, S. Pi
38.	451/169/Agm/Kesra	26 oktober 2010	PKS	Habib Said Hasan Al Habsyie, BSc
39.	451/180/Agm/Kesra	November 2010	PKS	Akhmad Jazuli, S. Ked. M. AP
40.	451/161/Agm/Kesra	Oktober 2010	PKS	Riswadi, S. IP
41.	451/146/Agm/Kesra	Oktober 2010	Demokrat	Dra. Hj. Hera Farina, MM
42.	451/145/Agm/Kesra	Oktober 2010	Demokrat	Hj. Ferita Hariyani, SE
43.	451/192/Agm/Kesra	Oktober 2010	Demokrat	H. A. Bisung
44.	451/159/Agm/Kesra	Oktober 2010	Demokrat	H. Ali Baderun
45.	451/186/Agm/Kesra	8 Agustus 2010	PBR	Ir. Burhanudin

Hal. 53 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.	451/189/Agm/Kesra	Oktober 2010	Demokrat	Ali Akbar Wijaya, ST. MM
47.	451/191/Agm/Kesra	22 Oktober 20	Demokrat	Safaruddin, SH. MH
48.	451/190/Agm/Kesra	Oktober 2010	Demokrat	H. A. Bisung
49.	451/157/Agm/Kesra	20 Oktober 2010	Demokrat	H. M. Iqbal Yudiannor
50.	451/158/Agm/Kesra	Oktober 2010	Demokrat	M. Husaini, SE. MM
51.	451/193/Agm/Kesra	September 2010	Demokrat	Hj. Ferita Hariyani, SE
52.	451/198/Agm/Kesra	November 2010	PAN	Ir. Soegeng Soesanto
53.	451/172/Agm/Kesra	1 November 2010	PAN	H. Abdul Hakim Halim, SE. MM
54.	451/168/Agm/Kesra	01 November 2010	PAN	Dra. Maitri Puspa Koesasih, M. Ap
55.	451/144/Agm/Kesra	September 2010	PAN	H. M. Husaini Aliman, Se, MM
56.	451/141/Agm/Kesra	31 Juli 2010	PAN	H. Abdul Hakim Halim, SE. MM
57.	451/141/Agm/Kesra	31 Juli 2010	PAN	H. Abdul Hakim Halim, SE. MM
58.	451/177/Agm/Kesra	Agustus	PDI	H. Muhaimin, SH.MH.Mkn.
59.	451/173/Agm/Kesra	6 Oktober 2010		H. Soeyono
60.	451/151/Agm/Kesra	Juli 2010	PDI	Novianti
61.	451/154/Agm/Kesra	20 April 2010		H. Soeyono
62.	451/146/Agm/Kesra	26 Oktober 2010		Drs. H. Budiman Mustafa
63.	451/170/Agm/Kesra	12 Oktober 2010		Muh. Ihsanuddin

LAMPIRAN DAFTAR BARANG SITAAN

DAFTAR ISI CEK ROBEKAN BERO KESRA

1. Robekan/Sobekan cek rek kesra pada Bank BPD Kal-Sel rekapan ke-4 Juli 2010 yang asli
 - Nomor AH. 084205
 - Nomor AH. 084207

Hal. 54 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor AH. 084208
 - Nomor AH. 084210
 - Nomor AH. 084212
 - Nomor AH. 084213
2. Robekan/Sobekan cek rek kesra pada Bank BPD Kal-Sel rekapan ke-5 September 2010 yang asli:
- Nomor AH. 084222
 - Nomor AH. 084223
 - Nomor AH. 084224
 - Nomor AH. 084225
 - Nomor AH. 083751
3. Robekan/Sobekan cek rek kesra pada Bank BPD Kal-Sel rekapan ke-6 November 2010 yang asli:
- Nomor AH. 083756
 - Nomor AH. 083757
 - Nomor AH. 083758
 - Nomor AH. 083759
4. Robekan/Sobekan cek rek kesra pada Bank BPD Kal-Sel rekapan ke-7 Desember 2010 yang asli:
- Nomor AH. 083767

LAMPIRAN DAFTAR BARANG SITAAN

Buku pembantu simpanan/Bank (Asli) bendahara pengeluaran pembantu Biro Kesra
Setda Prov. Kal-sel th. 2010

LAMPIRAN DAFTAR BARANG SITAAN

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
MARET 2010			
1	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010 Nomor BKU 02 s/d 26	25 berkas	Lengkap
2	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010 Nomor BKU 27 s/d 53	27 berkas	lengkap
3	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010 Nomor BKU 54 s/d 81	28 berkas	lengkap
4	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010	27 berkas	lengkap

Hal. 55 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor BKU 82 s/d 108		
5	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010 Nomor BKU 109 s/d 113 Nomor BKU 116 s/d 127 Nomor BKU 129 s/d 136	25 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 114 s/d 115, 128
APRIL			
6	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 530 s/d 557 Nomor BKU 559 s/d 670	140 berkas	Tidak Lengkap Nomor BKU 558 tidak ada
7	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 118	1 berkas	Lengkap
8	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 671 s/d 689 Nomor BKU 690 s/d 708	38 berkas	lengkap
9	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 709 s/d 726 Nomor BKU 727 s/d 745	37 berkas	lengkap
10	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 746 s/d 762 Nomor BKU 763 s/d 779	34 berkas	lengkap
11	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 780 s/d 798 Nomor BKU 779 s/d 816	57 berkas	Lengkap
12	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 817 s/d 834 Nomor BKU 835 s/d 849	33 berkas	lengkap
13	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 590	46 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 738 s/d 741, 995 s/d

Hal. 56 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor BKU 673 Nomor BKU 675 s/d 688 Nomor BKU 691 s/d 696 Nomor BKU 699 s/d 702 Nomor BKU 727 s/d 738 Nomor BKU 742 s/d 745 Nomor BKU 998 s/d 999 Nomor BKU 1003 Nomor BKU 1018		997, 1000 s/d 1001, 1004, 1006 s/d 1017, 1019 s/d 1024
14	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 850 s/d 869 Nomor BKU 870 s/d 886	37 berkas	lengkap
15	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 887 s/d 904 Nomor BKU 905 s/d 921	35 berkas	lengkap
16	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 922 s/d 938 Nomor BKU 939 s/d 956	35 berkas	lengkap
17	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 976 s/d 994	19 berkas	lengkap
18	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 995 s/d 1015 Nomor BKU 1016 s/d 1024	30 berkas	lengkap
19	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 137 s/d 164	28 berkas	lengkap
20	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Nomor BKU 165 s/d 173 Nomor BKU 176 s/d 190	30 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 174 s/d 175
21	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010	50 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 698,

Hal. 57 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor BKU 690 s/d 697 Nomor BKU 699 Nomor BKU 705 s/d 708 Nomor BKU 709 s/d 726 Nomor BKU 671 s/d 689		700 s/d 704
MEI			
22	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 672 Nomor BKU 674	2 berkas	Lengkap
23	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 689 Nomor BKU 690	2 berkas	Lengkap
24	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 710 s/d 721	11 berkas	Lengkap
25	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 662 Nomor BKU 664 s/d 671	9 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 663
26	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 641 s/d 661	21 berkas	Lengkap
27	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 597 s/d 618	22 berkas	Lengkap
28	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 573 s/d 596	24 berkas	Lengkap
29	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 553 s/d 574	22 berkas	Lengkap
30	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 531 s/d 552	22 berkas	Lengkap
31	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos	22 berkas	Lengkap

Hal. 58 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 509 s/d 530		
32	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 486 s/d 508	22 berkas	Lengkap
33	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 462 s/d 485	24 berkas	Lengkap
34	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 440 s/d 461	22 berkas	Lengkap
35	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 416 s/d 439	24 berkas	Lengkap
36	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 395 s/d Nomor BKU 407 Nomor BKU 409 s/d 415	9 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 408
37	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 373 s/d No BKU 376 Nomor BKU 378 s/d 394	19 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 377
38	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 350 s/d 372	23 berkas	Lengkap
39	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 326 s/d 349	24 berkas	Lengkap
40	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 303 s/d 325	23 berkas	Lengkap
41	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 281 s/d 302	22 berkas	Lengkap

Hal. 59 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 263 s/d 280	18 berkas	Lengkap
43	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 241 s/d 262	22 berkas	Lengkap
44	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 218 s/d 240	23 berkas	Lengkap
45	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 196 s/d 220 Nomor BKU 204 s/d 214 Nomor BKU 216 s/d 217	38 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 203 dan 215
46	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 174 s/d 177 Nomor BKU 179 s/d 195	21 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 178
47	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 153 s/d 173	21 berkas	Lengkap
48	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 132 No.BKU 134 s/d 147 Nomor BKU 149 Nomor BKU 151 s/d 152	18 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 133, 148, 150
49	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 111 s/d 131	21 berkas	Lengkap
50	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 92 s/d 110	19 berkas	Lengkap
51	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 74 s/d 91	18 berkas	Lengkap
52	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010	11 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU

Hal. 60 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor BKU 686 s/d 688 Nomor BKU 691 s/d 696 Nomor BKU 699 Nomor BKU 704		689,690,697,698, 700,703
53	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 673 Nomor BKU 675 s/d 685	12 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 674
54	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 440 s/d 461	22 berkas	lengkap
55	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 619 s/d 640	22 berkas	lengkap
56	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 74 s/d 91 Nomor BKU 92 s/d 110	37 berkas	lengkap
57	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 Nomor BKU 462 s/d 485	24 berkas	Tidak lengkap
JULI			
58	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Juli 2010 Nomor BKU 632	1 berkas	Lengkap
SEPTEMBER			
59	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010 Nomor BKU 88 Nomor BKU 96	2 berkas	Lengkap
60	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010 Nomor BKU 441	1 berkas	Lengkap
61	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010 Nomor BKU 410 Nomor BKU 412	8 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 411,413,417,418, 419,420,421.

Hal. 61 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor BKU 414 s/d 416 Nomor BKU 422 s/d 424		
62	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010 Nomor BKU 304 s/d 306	3 berkas	Lengkap
63	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010 Nomor BKU 231 s/d 233 Nomor BKU 240	4 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 234,235,236,237, 238,239
64	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010 Nomor BKU 210 Nomor BKU 212 Nomor BKU 222 Nomor BKU 224 Nomor BKU 227 Nomor BKU 229 s/d 230	7 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 211,213 s/d 221, 223,225 s/d 226,228.
65	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010 Nomor BKU 365 s/d 368	4 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 366,367.
66	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010 Nomor BKU 304 s/d 306	3 berkas	Lengkap
67	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010 Nomor BKU 499 s/d 500	2 berkas	Lengkap
68	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010 Nomor BKU 364 381 s/d 383	3 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 365 s/d 380
69	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010 Nomor BKU 429 Nomor BKU 432 s/d 433 Nomor BKU 438 Nomor BKU 443, 446	6 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 430,431,434 s/d 437, 439 s/d 442, 444,445.
NOVEMBER			

Hal. 62 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	<p>Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010</p> <p>Nomor BKU 121 s/d 134</p> <p>Nomor BKU 136 s/d 139</p> <p>Nomor BKU 141 s/d 142</p>	20 berkas	<p>Tidak Lengkap</p> <p>Nomor BKU 135, 140 tidak ada</p>
71	<p>Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010</p> <p>Nomor BKU 178 s/d 180</p>	3 berkas	Lengkap
72	<p>Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010</p> <p>Nomor BKU 1105</p>	1 berkas	Lengkap
73	<p>Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010</p> <p>Nomor BKU 928</p>	1 berkas	Lengkap
74	<p>Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010</p> <p>Nomor BKU 833</p> <p>Nomor BKU 203</p>	1 berkas	Lengkap
76	<p>Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010</p> <p>Nomor BKU 475 s/d 498</p>	24 berkas	Lengkap.
77	<p>Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010</p> <p>Nomor BKU 453 s/d 474</p>	22 berkas	Lengkap.
78	<p>Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010</p> <p>Nomor BKU 431</p> <p>Nomor BKU 434,435</p> <p>Nomor BKU 439</p> <p>Nomor BKU 442</p> <p>Nomor BKU 444,445</p> <p>Nomor BKU 447 s/d 452</p>	13 berkas	<p>Tidak lengkap</p> <p>Nomor BKU 429,430,432.433, 438,440,441,443, 446.</p>
79	<p>Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010</p> <p>Nomor BKU 408 s/d 409</p> <p>Nomor BKU 411</p> <p>Nomor BKU 413</p>	12 berkas	<p>Tidak lengkap</p> <p>Nomor BKU 410,412,414,415, 416,422,423,424, 428</p>

Hal. 63 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor BKU 417 s/d 421 Nomor BKU 425 s/d 427		
80	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 386 s/d 407	22 berkas	Lengkap
81	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 363 Nomor BKU 366,367 Nomor BKU 369 s/d 380 Nomor BKU 383 s/d 385	18 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 364,365,368,381, 382
82	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 339 s/d 362	24 berkas	Lengkap
83	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 316 s/d 338	23 berkas	Lengkap
84	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 294 s/d 303 Nomor BKU 307 s/d 315	19 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 304,305,306
85	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 276 s/d 293	18 berkas	Lengkap
86	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 254 s/d 275	22 berkas	Lengkap
87	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 232 Nomor BKU 239 Nomor BKU 242 s/d 247 Nomor BKU 250 s/d 253	12 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 234 s/d 238,240,241,248, 249
88	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 211 Nomor BKU 213	5 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 209,210,212,214, 216,217,220 s/d

Hal. 64 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor BKU 215 Nomor BKU 218,219		230
89	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 187 s/d 208	22 berkas	Lengkap
90	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 166 s/d 178	13 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 179
91	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 180 s/d 186	7 berkas	Lengkap
92	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 145 s/d 165	21 berkas	Lengkap
93	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 124 s/d 144	21 berkas	Lengkap
94	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 105 s/d 123	19 berkas	Lengkap
95	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 Nomor BKU 87 Nomor BKU 91 s/d 95 Nomor BKU 97 s/d 104	14 berkas	Tidak lengkap Nomor BKU 88 s/d 90, 96
DESEMBER			
96	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010 Nomor BKU 164 s/d 184	21 berkas	Lengkap
97	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010 Nomor BKU 143 s/d 163	21 berkas	Lengkap
98	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010 Nomor BKU 103 s/d 120 · Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010	18 berkas	Lengkap

Hal. 65 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor BKU 410 · Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan Tahun 2010 Nomor BKU 704		
99	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010 Nomor BKU 324 Nomor BKU 327 s/d 329 Nomor BKU 331 s/d 335 Nomor BKU 338 s/d 345	17 berkas	Tidak Lengkap Nomor BKU 325, 326, 330, 336, 337 tidak ada
100	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010 Nomor BKU 346 s/d 349 Nomor BKU 351 s/d 353 Nomor BKU 356 Nomor BKU 358 s/d 361	12 berkas	Tidak Lengkap Nomor BKU 350, 354, 355, 357 tidak ada
101	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010 Nomor BKU 206 s/d 230	25 berkas	Lengkap
102	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010 Nomor BKU 185 s/d 205	21 berkas	Lengkap
103	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010 Nomor BKU 253 s/d 275	23 berkas	Lengkap
104	Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010 Nomor BKU 231 s/d 252	22 berkas	Lengkap
JUMLAH		2145 berkas	

LAMPIRAN DAFTAR BARANG SITAAN

USULAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL TAHUN 2010

- 1 (satu) bundel Nota Dinas Permohonan Bantuan Sosial tahun 2010 dari Fraksi PBR;
- 1 (satu) bundel Nota Dinas Permohonan Bantuan Sosial tahun 2010 dari Fraksi PKS;
- 1 (satu) bundel Nota Dinas Permohonan Bantuan Sosial tahun 2010 dari Fraksi PAN;

Hal. 66 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundle Nota Dinas Permohonan Bantuan Sosial tahun 2010 dari Fraksi KBNR;
5. 1 (satu) bundle Nota Dinas Permohonan Bantuan Sosial tahun 2010 dari Fraksi Demokrat;
6. 1 (satu) bundle Nota Dinas Permohonan Bantuan Sosial tahun 2010 dari Fraksi Golkar;
7. 1 (satu) bundle Nota Dinas Permohonan Bantuan Sosial tahun 2010 dari Fraksi PPP;
8. 1 (satu) bundle Nota Dinas Permohonan Bantuan Sosial tahun 2010 dari Fraksi PDIP;
9. 1 (satu) unit CPU (Central Prossesing Unit) Merk CAMEROON;

LAMPIRAN DAFTAR BARANG SITAAN
 USULAN BANSOS DARI ANGGOTA DEWAN DPRD
 PROV. KALSEL TA. 2010
 UNTUK AMPRAHAN KE-4

No.	Nomor NOTA DINAS	TANGGAL	FRAKSI	Nama Anggota Dewan
1.	451/78/Agm/Kesra		PKB	H. Mulyadi Mangin, SE
2.	451/79/Agm/Kesra	Mei 2010	GOLKAR	H. M. Karno HA
3.	451/80/Agm/Kesra	20 Mei 2010	PAN	H. M. Husaini Aliman, SE
4.	451/81/Agm/Kesra	15 Juni 2010	PDI	H. Muhaimin, SH.MH.Hkn
5.	451/82/Agm/Kesra	April 2010	Golkar	Drs. H. Mansyah Sabri
6.	451/83/Agm/Kesra	20 April 2010		H. Soeyono
7.	451/84/Agm/Kesra	27 Mei 2010	Demokrat	Safaruddin, SH. MH
8.	451/85/Agm/Kesra	Mei 2010	Demokrat	H.A.Bisung
9.	451/86/Agm/Kesra	Mei 2010	Demokrat	H.A.Bisung
10.	451/87/Agm/Kesra	Mei 2010	Demokrat	H.A.Bisung
11.	451/88/Agm/Kesra	16 Juni 2010	PBR DPRD	H. Muhidin
12.	451/89/Agm/Kesra	1 Juni 2010	Demokrat	H. Soeyono
13.	451/90/Agm/Kesra	5 Juni 2010	PBR DPRD	Ir. Burhanudin
14.	451/91/Agm/Kesra	22 Juni 2010	PAN	H. Muhammad Yusri, S,Sos
15.	451/92/Agm/Kesra	Mei 2010	DPRD	Drs. H. Budiman Mustafa
16.	451/93/Agm/Kesra	Mei 2010	DPRD	Muh. Ihsanuddin
17.	451/94/Agm/Kesra	24 Juni 2010	KBNR	Drs. H. A. Munasib Halike
18.	451/95/Agm/Kesra	Juni 2010	Demokrat	Hj. Ferita Hariyani, SE
19.	451/96/Agm/Kesra	12 Juli 2010	PAN	H. Abdul Hakim Halim, SE. MM
20.	451/97/Agm/Kesra	25 Juni 2010		Susaini Suni, Lc

Hal. 67 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	451/98/Agm/Kesra	25 Juni 2010		Habib Said Hasan Al Habsyie, BSc
22.	451/99/Agm/Kesra	20 April 2010	PDI	Novianti
23.	451/100/Agm/Kesra	Juli 2010	Demokrat	Ali Akbar Wijaya, ST
24.	451/101/Agm/Kesra	Juli 2010	Golkar	H. Gusti Rudiansyah, SmHK
25.	451/102/Agm/Kesra	Juli 2010	Demokrat	H. Ali Baderun
26.	451/103/Agm/Kesra	Juli 2010	Demokrat	Dra. Hj. Hera Farina, MM
27.	451/104/Agm/Kesra	Juni 2010	KBNR	Hj. Rosnani, SH
28.	451/105/Agm/Kesra	08 Juli 2010	PBR	Drs. H. Riduan Ms
29.	451/106/Agm/Kesra	12 Juli 2010	PBR	H. Asmara Yanto, SH
30.	451/107/Agm/Kesra	12 Juli 2010	Demokrat	H. M. Iqbal Yudiannoor
31.	451/108/Agm/Kesra		PPP	H. Ansor Ramadlan, M.Fil.I
32.	451/.../Agm/Kesra	Juli 2010		Akhmad Jazuli, S.Ked. MAP

USULAN BANSOS DARI ANGGOTA DEWAN DPRD

PROV. KALSEL TA. 2010

UNTUK AMPRAHAN KE-5

No.	Nomor NOTA DINAS	TANGGAL	FRAKSI	Nama Anggota Dewan
1.	451/130/Agm/Kesra	20 Juli 2010	PBR	Riduansyah, SH.
2.	451/139/Agm/Kesra	Juli 2010	PBR	H. Muhidin
3.	451/126/Agm/Kesra	Agustus 2010	Golkar	H. Gusti Rudiansyah, SmHK
4.	451/124/Agm/Kesra	Agustus 2010	Golkar	Susan, SH. MH.
5.	451/123/Agm/Kesra	Agustus 2010	Golkar	Ir. Gusti Perdana Kesuma
6.	451/119/Agm/Kesra	Agustus 2010	Golkar	DR. H. Bardiansyah, MM
7.	451/115/Agm/Kesra	Agustus 2010	Golkar	Ir. H. Hasmy Fadillah Akbar, MM
8.	451/128/Agm/Kesra		Golkar	H. Puar Junaidi, S.Sos
9.	451/133/Agm/Kesra		PPP	M. Rafi'ie Muksin, S.Ag
10.	451/134/Agm/Kesra		PPP	H. Ansor Ramadlan, M.Fil.I
11.	451/135/Agm/Kesra		PPP	Drs. Midy Yusi
12.	451/117/Agm/Kesra		PPP	H. Zainal Arifin, SH. MH.
13.	451/137/Agm/Kesra		PPP	Nasrullah. AR, S.Pd.I
14.	451/136/Agm/Kesra		PPP	Faturrahman, S.Pd.I
15.	451/131/Agm/Kesra		PPP	H. Zainal Arifin, SH. MH.
16.	451/132/Agm/Kesra		PPP	Habib Ali Khaidir Alkaff
17.	451/120/Agm/Kesra	31 Juli 2010	PPPIR	Ilham Nor, ST.
18.	451/121/Agm/Kesra	15 Juli 2010	KBNR	H. Abdul Latief Hanafiah,

Hal. 68 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				M.Sc
19.	451/118/Agm/Kesra	20 Juli 2010	KBNR	Hj. Hariyatie
20.	451/122/Agm/Kesra	18 Agustus 2010	PKS	Muh. Ihsanudin
21.	451/140/Agm/Kesra	2 Oktober 2010	PKS	Habib Said Hasan Al Habsyie, B.Sc
22.	451/116/Agm/Kesra	Juli 2010	PKS	Ibnu Sina, S.Pi
23.	451/129/Agm/Kesra	4 Agustus	Partai Demokrat	Hj.Ferita Hariyani, SE.
24.	451/125/Agm/Kesra	Agustus 2010	Partai Demokrat	H. Ali Baderun
25.	451/113/Agm/Kesra		Partai Demokrat	Hj.Ferita Hariyani, SE.
26.	451/138/Agm/Kesra	September 2010	PAN	H. M. Yusri, SE.
27.	451/112/Agm/Kesra	3 Agustus 2010	PAN	Dra. Maitri Puspa K, M.AP
28.	451/111/Agm/Kesra	18 Agustus 2010	PAN	H. Abdul Hakim Halim, SE. MM.
29.	451/127/Agm/Kesra	Juli 2010	PDIP	Novianti
30.	451/114/Agm/Kesra	Juli 2010	PDIP	H. Zaini, SH. MH. MKN.

LAMPIRAN DAFTAR BARANG SITAAN

TANDA TERIMA NOTA DINAS GUBERNUR (ASLI)

AMPRAHAN YANG KE-5

TAHUN 2010

No.	Bulan	Nomor Nota Dinas	Amprahan yang ke 5 Asli/tidak asli
1	2	3	4
1.	20 Agustus 2010	451/110/Agm/Kesra	Asli
2.	20 Agustus 2010	451/111/Agm/Kesra	Asli
3.	20 Agustus 2010	451/112/Agm/Kesra	Asli
4.	30 Agustus 2010	451/113/Agm/Kesra	Asli
5.	30 Agustus 2010	451/114/Agm/Kesra	Asli
6.	30 Agustus 2010	451/115/Agm/Kesra	Asli
7.	30 Agustus 2010	451/116/Agm/Kesra	Asli
8.	30 Agustus 2010	451/117/Agm/Kesra	Asli
9.	31 Agustus 2010	451/118/Agm/Kesra	Asli

Hal. 69 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	01 September 2010	451/119/Agm/Kesra	Asli
11.	06 September 2010	451/120/Agm/Kesra	Asli
12.	06 Agustus 2010	451/121/Agm/Kesra	Asli
13.	06 September 2010	451/122/Agm/Kesra	Asli
14.	06 September 2010	451/123/Agm/Kesra	Asli
15.	06 September 2010	451/124/Agm/Kesra	Asli
16.	06 September 2010	451/125/Agm/Kesra	Asli
17.	06 September 2010	451/126/Agm/Kesra	Asli
18.	17 September 2010	451/127/Agm/Kesra	Asli
19.	17 September 2010	451/128/Agm/Kesra	Asli
20.	17 September 2010	451/129/Agm/Kesra	Asli
21.	17 September 2010	451/130/Agm/Kesra	Asli
22.	17 September 2010	451/131/Agm/Kesra	Asli
23.	17 September 2010	451/132/Agm/Kesra	Asli
24.	17 September 2010	451/133/Agm/Kesra	Asli
25.	17 September 2010	451/134/Agm/Kesra	Asli
26.	17 September 2010	451/135/Agm/Kesra	Asli
27.	17 September 2010	451/136/Agm/Kesra	Asli
28.	17 September 2010	451/137/Agm/Kesra	Asli
29.	17 September 2010	451/138/Agm/Kesra	Asli
30.	17 September 2010	451/139/Agm/Kesra	Asli
31.	17 September 2010	451/140/Agm/Kesra	Asli

LAMPIRAN DAFTAR BARANG SITAAN

TANDA TERIMA NOTA DINAS GUBERNUR (ASLI)

AMPRAHAN YANG KE-6

TAHUN 2010

No.	Bulan	Nomor Nota Dinas	Amprahan yang ke 6 Asli/tidak asli
1	2	3	4
1.	25 Oktober 2010	451/141/Agm/Kesra	Asli
2.	25 Oktober 2010	451/142/Agm/Kesra	Asli
3.	25 Oktober 2010	451/143/Agm/Kesra	Asli
4.	25 Oktober 2010	451/144/Agm/Kesra	Asli
5.	25 Oktober 2010	451/145/Agm/Kesra	Asli
6.	26 Oktober 2010	451/146/Agm/Kesra	Asli
7.	01 November 2010	451/147/Agm/Kesra	Asli
8.	01 November 2010	451/148/Agm/Kesra	Asli

Hal. 70 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	01 November 2010	451/149/Agm/Kesra	Asli
10.	01 November 2010	451/150/Agm/Kesra	Asli
11.	01 November 2010	451/151/Agm/Kesra	Asli
12.	01 November 2010	451/152/Agm/Kesra	Asli
13.	02 November 2010	451/155/Agm/Kesra	Asli
14.	02 November 2010	451/156/Agm/Kesra	Asli
15.	03 November 2010	451/159/Agm/Kesra	Asli
16.	03 November 2010	451/160/Agm/Kesra	Asli
17.	02 November 2010	451/161/Agm/Kesra	Asli
18.	02 November 2010	451/162/Agm/Kesra	Asli
19.	02 November 2010	451/163/Agm/Kesra	Asli
20.	03 November 2010	451/164/Agm/Kesra	Asli
21.	November 2010	451/165/Agm/Kesra	Asli
22.	November 2010	451/167/Agm/Kesra	Asli
23.	November 2010	451/168/Agm/Kesra	Asli
24.	November 2010	451/169/Agm/Kesra	Asli
25.	November 2010	451/170/Agm/Kesra	Asli
26.	November 2010	451/171/Agm/Kesra	Asli
27.	November 2010	451/172/Agm/Kesra	Asli
28.	November 2010	451/173/Agm/Kesra	Asli
29.	November 2010	451/174/Agm/Kesra	Asli
30.	November 2010	451/175/Agm/Kesra	Asli
31.	November 2010	451/176/Agm/Kesra	Asli
32.	November 2010	451/177/Agm/Kesra	Asli
33.	Oktober 2010	451/178/Agm/Kesra	Asli
34.	November 2010	451/179/Agm/Kesra	Asli
35.	November 2010	451/180/Agm/Kesra	Asli
36.	November 2010	451/181/Agm/Kesra	Asli
37.	November 2010	451/182/Agm/Kesra	Asli

LAMPIRAN DAFTAR BARANG SITAAN
TANDA TERIMA NOTA DINAS GUBERNUR (ASLI)

AMPRAHAN YANG KE-7
TAHUN 2010

No.	Bulan	Nomor Nota Dinas	Amprahan yang ke 4 Asli/tidak asli
1	2	3	4
1.	Desember 2010	451/201/Agm/Kesra	Asli

Hal. 71 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Desember 2010	451/202/Agm/Kesra	Asli
3.	Desember 2010	451/203/Agm/Kesra	Asli
4.	Desember 2010	451/204/Agm/Kesra	Asli
5.	Desember 2010	451/205/Agm/Kesra	Asli
6.	Desember 2010	451/206/Agm/Kesra	Asli
7.	Desember 2010	451/207/Agm/Kesra	Asli
8.	Desember 2010	451/208/Agm/Kesra	Asli
9.	Desember 2010	451/209/Agm/Kesra	Asli
10.	Desember 2010	451/210/Agm/Kesra	Asli
11.	Desember 2010	451/211/Agm/Kesra	Asli
12.	Desember 2010	451/212/Agm/Kesra	Asli
13.	Desember 2010	451/213/Agm/Kesra	Asli
14.	Desember 2010	451/214/Agm/Kesra	Asli
15.	Desember 2010	451/215/Agm/Kesra	Asli
16.	Desember 2010	451/217/Agm/Kesra	Asli
17.	Desember 2010	451/218/Agm/Kesra	Asli

DAFTAR PERMINTAAN SPP LS
BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
BULAN JULI 2010

No.	Nomor Nota Dinas	Tanggal Persetujuan Gub	Besarnya
1.	451/78/Agm/Kesra	4 Juli 2010	198.000.000
2.	451/79/Agm/Kesra	4 Juli 2010	85.000.000
3.	451/80/Agm/Kesra	4 Juli 2010	100.000.000
4.	451/81/Agm/Kesra	4 Juli 2010	194.000.000
5.	451/82/Agm/Kesra	4 Juli 2010	166.500.000
6.	451/83/Agm/Kesra	4 Juli 2010	170.000.000
7.	451/84/Agm/Kesra	4 Juli 2010	300.000.000
8.	451/85/Agm/Kesra	4 Juli 2010	75.000.000
9.	451/86/Agm/Kesra	4 Juli 2010	170.000.000
10.	451/87/Agm/Kesra	4 Juli 2010	125.000.000
11.	451/88/Agm/Kesra	4 Juli 2010	105.000.000
12.	451/89/Agm/Kesra	4 Juli 2010	6.000.000
13.	451/90/Agm/Kesra	4 Juli 2010	175.000.000
14.	451/91/Agm/Kesra	4 Juli 2010	200.000.000
15.	451/92/Agm/Kesra	4 Juli 2010	185.000.000
16.	451/93/Agm/Kesra	4 Juli 2010	35.000.000
17.	451/94/Agm/Kesra	4 Juli 2010	104.000.000

Hal. 72 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	451/95/Agm/Kesra	4 Juli 2010	46.000.000
19.	451/96/Agm/Kesra	4 Juli 2010	100.000.000
20.	451/97/Agm/Kesra	4 Juli 2010	91.500.000
21.	451/98/Agm/Kesra	4 Juli 2010	58.500.000
22.	451/99/Agm/Kesra	4 Juli 2010	113.000.000
23.	451/100/Agm/Kesra	4 Juli 2010	129.000.000
24.	451/101/Agm/Kesra	4 Juli 2010	100.000.000
25.	451/102/Agm/Kesra	4 Juli 2010	100.000.000
26.	451/103/Agm/Kesra	4 Juli 2010	25.000.000
27.	451/104/Agm/Kesra	4 Juli 2010	52.250.000
28.	451/105/Agm/Kesra	4 Juli 2010	153.000.000
29.	451/106/Agm/Kesra	4 Juli 2010	200.000.000
30.	451/107/Agm/Kesra	4 Juli 2010	48.000.000
31.	451/108/Agm/Kesra	4 Juli 2010	113.000.000
32.	451/109/Agm/Kesra	4 Juli 2010	150.500.000
J U M L A H			3.874.050.000

DAFTAR PERMINTAAN SPP LS
BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
BULAN SEPTEMBER 2010

No.	Nomor Nota Dinas	Tanggal Persetujuan Gub	Besarnya
1.	451/110/Agm/Kesra	16 Juli 2010	252.000.000
2.	451/111/Agm/Kesra	25 Agust 2010	235.000.000
3.	451/112/Agm/Kesra	25 Agust 2010	172.000.000
4.	451/113/Agm/Kesra	25 Agust 2010	40.000.000
5.	451/114/Agm/Kesra	25 Agust 2010	173.000.000
6.	451/115/Agm/Kesra	25 Agust 2010	115.000.000
7.	451/116/Agm/Kesra	25 Agust 2010	117.500.000
8.	451/117/Agm/Kesra	25 Agust 2010	61.500.000
9.	451/118/Agm/Kesra	25 Agust 2010	180.000.000
10.	451/119/Agm/Kesra	25 Agust 2010	125.000.000
11.	451/120/Agm/Kesra	25 Agust 2010	73.000.000
12.	451/121/Agm/Kesra	25 Agust 2010	95.000.000
13.	451/122/Agm/Kesra	25 Agust 2010	43.000.000
14.	451/123/Agm/Kesra	25 Agust 2010	90.500.000
15.	451/124/Agm/Kesra	25 Agust 2010	80.500.000
16.	451/125/Agm/Kesra	25 Agust 2010	100.000.000
17.	451/126/Agm/Kesra	25 Agust 2010	26.500.000

Hal. 73 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	451/127/Agm/Kesra	25 Agust 2010	67.000.000
19.	451/128/Agm/Kesra	25 Agust 2010	120.000.000
20.	451/129/Agm/Kesra	25 Agust 2010	80.000.000
21.	451/130/Agm/Kesra	25 Agust 2010	144.000.000
22.	451/131/Agm/Kesra	25 Agust 2010	80.000.000
23.	451/132/Agm/Kesra	25 Agust 2010	50.000.000
24.	451/133/Agm/Kesra	25 Agust 2010	104.000.000
25.	451/134/Agm/Kesra	25 Agust 2010	150.000.000
26.	451/135/Agm/Kesra	25 Agust 2010	150.000.000
27.	451/136/Agm/Kesra	25 Agust 2010	200.000.000
28.	451/137/Agm/Kesra	25 Agust 2010	200.000.000
29.	451/138/Agm/Kesra	25 Agust 2010	100.000.000
30.	451/139/Agm/Kesra	25 Agust 2010	77.000.000
31.	451/140/Agm/Kesra	25 Agust 2010	70.500.000
J U M L A H			3.572.000.000

DAFTAR PERMINTAAN SPP LS
BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
BULAN NOVEMBER 2010

No.	Nomor Nota Dinas	Tanggal Persetujuan Gub	Besarnya
1.	451/.../Agm/Kesra	16 Juli 2010	20.000.000
2.	451/.../Agm/Kesra	25 Agust 2010	2.000.000
3.	451/141/Agm/Kesra	03 Nov 2010	65.000.000
4.	451/142/Agm/Kesra	03 Nov 2010	100.000.000
5.	451/143/Agm/Kesra	03 Nov 2010	204.000.000
6.	451/144/Agm/Kesra	03 Nov 2010	200.000.000
7.	451/145/Agm/Kesra	03 Nov 2010	160.000.000
8.	451/146/Agm/Kesra	03 Nov 2010	200.000.000
9.	451/147/Agm/Kesra	03 Nov 2010	200.000.000
10.	451/148/Agm/Kesra	03 Nov 2010	199.000.000
11.	451/149/Agm/Kesra	03 Nov 2010	100.000.000
12.	451/150/Agm/Kesra	03 Nov 2010	196.000.000
13.	451/151/Agm/Kesra	03 Nov 2010	185.000.000
14.	451/152/Agm/Kesra	03 Nov 2010	60.500.000
15.	451/153/Agm/Kesra	03 Nov 2010	110.000.000
16.	451/154/Agm/Kesra	03 Nov 2010	100.000.000
17.	451/155/Agm/Kesra	03 Nov 2010	141.500.000
18.	451/156/Agm/Kesra	03 Nov 2010	80.000.000

Hal. 74 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	451/157/Agm/Kesra	03 Nov 2010	200.000.000
20.	451/158/Agm/Kesra	03 Nov 2010	200.000.000
21.	451/159/Agm/Kesra	03 Nov 2010	200.000.000
22.	451/160/Agm/Kesra	03 Nov 2010	79.500.000
23.	451/161/Agm/Kesra	03 Nov 2010	304.000.000
24.	451/162/Agm/Kesra	03 Nov 2010	260.000.000
25.	451/163/Agm/Kesra	03 Nov 2010	197.500.000
26.	451/164/Agm/Kesra	03 Nov 2010	242.000.000
27.	451/165/Agm/Kesra	03 Nov 2010	200.000.000
28.	451/166/Agm/Kesra	03 Nov 2010	58.500.000
29.	451/167/Agm/Kesra	03 Nov 2010	150.000.000
30.	451/168/Agm/Kesra	03 Nov 2010	178.000.000
31.	451/169/Agm/Kesra	03 Nov 2010	29.000.000
32.	451/170/Agm/Kesra	03 Nov 2010	20.000.000
33.	451/171/Agm/Kesra	03 Nov 2010	35.000.000
34.	451/172/Agm/Kesra	03 Nov 2010	200.000.000
35.	451/173/Agm/Kesra	03 Nov 2010	100.000.000
36.	451/174/Agm/Kesra	03 Nov 2010	200.000.000
37.	451/175/Agm/Kesra	03 Nov 2010	200.000.000
38.	451/176/Agm/Kesra	03 Nov 2010	100.000.000
39.	451/177/Agm/Kesra	03 Nov 2010	200.000.000
40.	451/178/Agm/Kesra	03 Nov 2010	54.000.000
41.	451/179/Agm/Kesra	03 Nov 2010	40.000.000
42.	451/180/Agm/Kesra	03 Nov 2010	78.000.000
43.	451/181/Agm/Kesra	03 Nov 2010	162.000.000
44.	451/182/Agm/Kesra	03 Nov 2010	195.000.000
45.	451/183/Agm/Kesra	03 Nov 2010	293.000.000
46.	451/184/Agm/Kesra	03 Nov 2010	146.000.000
47.	451/185/Agm/Kesra	03 Nov 2010	110.500.000
48.	451/186/Agm/Kesra	03 Nov 2010	100.000.000
49.	451/187/Agm/Kesra	03 Nov 2010	105.000.000
50.	451/188/Agm/Kesra	03 Nov 2010	265.500.000
51.	451/189/Agm/Kesra	03 Nov 2010	200.000.000
52.	451/190/Agm/Kesra	03 Nov 2010	200.000.000
53.	451/191/Agm/Kesra	03 Nov 2010	200.000.000
54.	451/192/Agm/Kesra	03 Nov 2010	200.000.000
55.	451/193/Agm/Kesra	03 Nov 2010	110.000.000
56.	451/194/Agm/Kesra	03 Nov 2010	96.000.000

Hal. 75 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.	451/195/Agm/Kesra	03 Nov 2010	37.500.000
58.	451/196/Agm/Kesra	03 Nov 2010	123.500.000
59.	451/197/Agm/Kesra	03 Nov 2010	50.000.000
60.	451/198/Agm/Kesra	03 Nov 2010	100.000.000
61.	451/199/Agm/Kesra	03 Nov 2010	171.000.000
62.	451/200/Agm/Kesra	03 Nov 2010	94.500.000
J U M L A H			8.808.000.000

DAFTAR PERMINTAAN SPP LS
BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
BULAN DESEMBER 2010

No.	Nomor Nota Dinas	Tanggal Persetujuan Gub	Besarnya
1.	451/201/Agm/Kesra	Desember 2010	120.000.000
2.	451/202/Agm/Kesra	Desember 2010	370.000.000
3.	451/203/Agm/Kesra	Desember 2010	293.000.000
4.	451/204/Agm/Kesra	Desember 2010	100.000.000
5.	451/205/Agm/Kesra	Desember 2010	200.000.000
6.	451/206/Agm/Kesra	Desember 2010	200.000.000
7.	451/207/Agm/Kesra	Desember 2010	309.500.000
8.	451/208/Agm/Kesra	Desember 2010	120.000.000
9.	451/209/Agm/Kesra	Desember 2010	196.000.000
10.	451/210/Agm/Kesra	Desember 2010	173.000.000
11.	451/211/Agm/Kesra	Desember 2010	141.500.000
12.	451/212/Agm/Kesra	Desember 2010	89.500.000
13.	451/213/Agm/Kesra	Desember 2010	100.000.000
14.	451/214/Agm/Kesra	Desember 2010	6.500.000
15.	451/215/Agm/Kesra	Desember 2010	50.000.000
16.	451/216/Agm/Kesra	Desember 2010	20.500.000
17.	451/217/Agm/Kesra	Desember 2010	15.000.000
18.	451/218/Agm/Kesra	Desember 2010	47.000.000
J U M L A H			2.551.500.000

Penetapan Nomor 84/Persit/TPK/2013/PN.BJM tanggal 18 Desember 2013 atas benda berupa:

DAFTAR BARANG BUKTI

No.	Nama berkas	Tempat ruangan	Jumlah	Keterangan
1.	Hj.Ferita Hariyani	Partai	1 Bundel	Dengan Anggaran Rp200

Hal. 76 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Demokrat		Jt tahap 2
2.	Hj. Ferita Hariyani	Sda	Sda	Dengan Anggaran Rp200 Jt Tahap 1
3.	H. Ali Badrun	Sda	Sda	Dengan Anggaran Rp200 Jt Dana Sosial
4.	Sda	Sda	Sda	Arsip alokatif tahap 2 Rp100 Jt
5.	M. Husaini, SE. MM	Sda	Sda	Dengan arsip Alokatif Tahap II
6.	H. Ali Badrun	Sda	Sda	Arsip Alokatif
7.	H. A. Bisung	Sda	Sda	Arsip Tahap I
8.	Ferita	Sda	Sda	Arsip Permohonan bantuan dari Biro Kesra
9.	Sfarudin, SH. MH	Sda	Sda	Laporan Bansos 2010
10.	H. Ali Badrun	Sda	Sda	Proposal Masyarakat yg ditujukan ke Gubernur
11.	Safaruddin, SH. MH	Sda	Sda	Arsip SPJ
12.	Safaruddin, SH. MH.	Sda	Sda	Laporan bansos 2010 banjarmasin
13.	Buku Tanda Terima	Sda	Sda	Nota dinas alokatif f.Demokrat
14.	H. Achmad Bisung	Sda	Sda	Rancangan kebijakan umum perubahan APBD Tahun Anggaran 2010
15.	H. Achmad Bisung	Sda	Sda	Rancangan Prioritas dan flapon anggaran sementara perubahan APBD Tahun Anggaran 2010
16.	Desa Puduk Kec. Awayan Kab. Balangan Prov. Kalsel Thn. 2010	Sda	Sda	Proposal Permohonan Bantuan Dana Kelompok Tani
17.	Panitia Pembangunan Mushalla al- maqrub	Sda	Sda	Permohonan Bantuan Dana Untuk pembangunan Mushalla
18.	Pengurus Rukun Kematian	Sda	Sda	Permohonan bantuan Dana Untuk Rukun kematian
19.	Rukun kematian Darul	Sda	Sda	Permohonan Bantuan

Hal. 77 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ihsan Kab. Kotabaru			Dana
20.	Desa Buruh Bahinu luar kec. Paringin selatan Kab. Balangan	Sda	Sda	Proposal permohonan bantuan dana untuk kelompok warga
21.	Panitia Pembangunan Mesjid Al Abrar Rt. 03 Desa Sulingan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong	Sda	Sda	Proposal Permohonan bantuan Dana Pembangunan mesjid Al Abrar
22.	Panitia Pembangunan Mesjid Al Muhajirin Kec. Tanjung Kab. Tabalong Kalsel	Sda	Sda	Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Mesjid Al muhajirin
23.	Panitia Perbaikan Jalan Gg. Rt. 4 Desa Panawakan Kec. Haur Gading Tahun 2010	Sda	Sda	Proposal Permohonan Bantuan Peninggian Jalan Gg. Rt.4 Desa Panawakan
24.	Desa lampihong kanan Kec. Lampihng Kab. Balangan Prop. Kalsel 2010	Sda	Sda	Proposal Permohonan bantuan dana pembelian mesin peruntuk padi dan tarpal
25.	kelompok Al amin	Sda	Sda	Permohonan Bantuan dana
26.	Panitia Pembangunan langgar Raudhatul Janah	Sda	Sda	Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembuatan Tempat Wudhu dan WC langgar Raudhatul Janah
27.	Desa sikuntan kec. Awayan kab. Balangan Prov. Kalsel 2010	Sda	Sda	Proposal Permohonan bantuan dana untuk langgar Al ikhlas desa sikuntan Kec. Awayan
28.	Desa Bungin Kec. Paringin selatan Kab. Balangan Prov. Kalsel 2010	Sda	Sda	Proposal permohonan bantuan dana untuk perbaikan langgar Nurul Hasanah
29.	kebun desa mabuun Rt. 1 kec. Murung Pudak	Sda	Sda	Proposal Bantuan sirtu
30.	Desa sungai tabuk kec. Lampihong Kab.	Sda	Sda	Proposal permohonan bantuan dana untuk

Hal. 78 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Balangan prop kalsel 2010			kelompok salawat
31.	Desa sungai tabuk kec. Lampihong Kab. Balangan prop kalsel 2010	Sda	Sda	Proposal permohonan bantuan dana untuk perbaikan langgar darul ulum
32.	Kec. Paringin Kab. Balangan Kalsel	Sda	Sda	Proposal kelompok Yasinan Burdah desa babayau
33.	Desa Inan Kec. Paringin selatan Kab.balangan	Sda	Sda	Proposal Bantuan Dana Jalan Usaha Tani
34.	Desa Uren Kec. Halong Kab. Balangan Kalsel 2010	Sda	Sda	Proposal Kelompok Tani maju bersama
35.	Pemerintah Kab. Hulu sungai Utara Kec. Haur Gading desa panawakan tahun 2010 sungai Utara	Sda	Sda	Proposal Permohonan Perbaikan Langgar Nurul Mubin Rt. IV Panawakan Kec. Haur Gading Kab. Hulu
36.	Desa buntu pilanduk kec. Halong Kab. Balangan kalsel 2010	Sda	Sda	Proposal kelompok tani bina maju
37.	Seni budaya adat kab. Balangan	Sda	Sda	Proposal permohonan bantuan dana
38.	Desa baruh panyambaran kec. Halong kab. Balangan	Sda	Sda	Proposal permohonan bantuan dana kelompok yasinan peteri dukuh permai
39.	Desa Kapul Rt. 01 kec. Halong kab. Balangan 2010	Sda	Sda	proposal permohonan bantuan dana pembangunan srana air bersih
40.	Desa uren kec. Halong kab. Balangan 2010	Sda	Sda	Proposal kelompok tani bina bania
41.	Pengurus rukun kematian desa bumi makmur	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana untuk kematian
42.	kelompok habsyi sirajul huda	Sda	Sda	Bantuan sarana dan prasarana

Hal. 79 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.	Bantuan dana Rehabilitasi langgar al muhajirin	Sda	Sda	Bantuan sarana dan prasarana
44.	Bantuan dana alat-alat perlengkapan panitia hari besar islam masjid nurul hidayah aluh aluh besar	Sda	Sda	Bantuan dana
45.	langgar darul mutafakkirin desa pemurus kec. Aluh aluh kab. Banjar kalsel	Sda	Sda	Bantuan Dana Untuk Perbaikan Pelapon
46.	langgar nurul iman desa aluh aluh besar kec. Aluh aluh pemerintah kab. Banjar	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana rehab langgar nurul iman
47.	mesjid darul ubudiah desa lukbayur kec. Tanta kab. Tabalong rt. 01 kalsel	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana pembangunan langgar
48.	musholla bani isa jl. Sungai jingah rt. 14 kel. Surgi mufti kec. Banjarmasin utara prov. Kalsel 2010	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana rehab batang musholla bani isa dan pembelian keranda pemandian jenazah
49.	perkumpulan maulid habsyi al musyirah kec. Banjarmasin utara kota banjarmasin	Sda	Sda	Bantuan dana
50.	Proposal dari kelompok PKK Rt. 3 dan 4 kel. Surgi Mufti kec. Banjar Utara Banjarmasin	Sda	Sda	Bantuan perlengkapan bersekolah untuk anak keluarga prasejahtera
51.	Proposal dari Taman asuh anak Muslim ta' dibul amin Jl. AES. Nasution Gg. Jambu Rt. 03 Rw. 01 Banjarmasin	Sda	Sda	Permohonan Bantuan Dana
52.	Proposal dari kelompok	Sda	Sda	Bantuan dana perbaikan

Hal. 80 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



	kelurahan sungai malang kec. Amuntai tengah kab. Hulu sungai utara tahun2010			peninggian jalan komp. CPS I kel. Sungai Malang
53.	Proposal dari kelompok kelurahan antasari kec. Amuntai tengah kab. Hulu sungai utara 2010	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana rehab gang rawa indah kel. Antasari
54.	Proposal dari warga siring sungai kali negara desa keramat Rt.1 Kec. Amuntai selatan kab. Hulu sungai Utara tahun 2010	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana perbaikan siring sungai kali negara
55.	Proposal KSM sejahtera desa tanta Rt. I kec. Tanta	Sda	Sda	Bantuan dana untuk semenisasi gang
56.	Proposal KSM mandiri kel. Tanjung kec. Tanjung	Sda	Sda	Bantuan Pengaspalan
57.	Proposal dari panitia perbaikan jalan gang Rt. 4 desa panawakan kec. Haur Gading Tahun 2010	Sda	Sda	Bantuan peninggian jalan gang Rt.4 desa panawakan
58.	Proposal dari desa simpang warga dalam kec. Aluh aluh pemerintah kab. Banjar	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana pembangunan gedung TK, TPA, TQA Raudhatul Jannah
59.	Proposal dari kelompok Tani Harapan Masa Jl. Padat karya desa sungai rangas Rt. 02 Kec. Martapura Barat Kab. Banjar Kalsel	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana untuk pembuatan jalan usaha tani dan selamatan panen
60.	Proposal persatuan sepak bola putra jingah tunggal desa sungai rangas Rt. 02 Kec.	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Martapura Barat Kab. Banjar			
61.	Proposal dari barisan pemadam kebakaran BPK Berlian Kota Banjarbaru	Sda	Sda	Mohon bantuan Dana atau Peralatan
62.	Proposal KSM Mandiri Kel. Tanjung Kec. Tanjung	Sda	Sda	Mohon bantuan Pengaspalan
63.	Proposal dari rukun kematian desa harapan baru kel. Batu piring kec. Paringin selatan kab. Balangan 2010	Sda	Sda	Bantuan dana
64.	Proposal dari mesjid nurul islam desa sidomulyo kec. Kelumpang hulu kab. Kotabaru	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
65.	Proposal dari panitia pembangunan Mushalla al Maqrub	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana Untuk pembangunan Mushalla
66.	Proposal dari kelompok bina seni remaja "An Nauva Group" Jl. Jendral A. Yani Km. 4 Kec. Pugaan Kab. Tabalong	Sda	Sda	Permohonan Bantuan alat musik
67.	Proposal dari langgar al wustha jl. Jend. Ayani Desa sei Rukam I Rt. 2 Kec. Pugaan Kab. Tabalong	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana rehab total langgar al wustha
68.	Proposal dari TKIT. TA'DIBUL AMIN Jl. Kampung melayu darat Gg. IAIN Rt. 11 banjarmasin 2010	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana perbaikan
69.	Proposal dari majelis	Sda	Sda	Bantuan Dana

Hal. 82 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



	Ta'lim Al Haq Jalan Veteran Gg. Sepakat banjarmasin			
70.	Proposal dari panitia pembangunan RT. III desa Uren Kec. Halong Kab. Balangan Kalsel tahun 2010	Sda	Sda	Mohon bantuan dana
71.	Proposal dari langgar darul Ulum desa Batu Merah Kec. Lampihong Kab. Balangan Prop. Kalsel	Sda	Sda	Bantuan dana untuk perbaikan langgar darul ulum
72.	Proposal kelompok yasinan burdah kec. Paringin kab. Balangan kalsel	Sda	Sda	Permohonan bantuan sarana prasarana yasinan burdah
73.	Proposal dari panitia pengurukan jalan kebun masyarakat Rt.1 desa Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Tahun 2010	Sda	Sda	Bantuan sirtu
74.	Proposal himpunan ibu ibu majelis ta lim al anshor desa stagen kec. Pulau laut utara kab. Kotabaru	Sda	Sda	Mohon Bantuan dana
75.	Proposal dari panitia kelompok peduli lingkungan Rt. 06 Desa Nalui Rt. 06 Kec. Jaro Kab. Tabalong	Sda	1 lembar	Permohonan Biaya Pembuatan WC Umum
76.	Proposal dari pengajian al hidayah kab. Kotabaru	Sda	1 bundel	Permohonan Bantuan
77.	Proposal dari pembinaan anak yatim piatu tahun 2010 jl.	Sda	Sda	Mohon Bantuan Perbaikan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Meranti merah Pemurus II Blok J			
78.	Proposal darin kelompok Yasinan Puteri dukuh permai desa baruh Panyambaran Kec. Halong Kab. Balangan 2010	Sda	Sda	Permohonan bantuan Dana
79.	Proposal dari langgar Nurul Mubin Rt. IV Panawakan Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara	Sda	Sda	Mohon bantuan keuangan
80.	Proposal dari seni budaya adat desa mantuyan kec. Halong kab. Balangan prop. Kalsel tahun 2010	Sda	Sda	Permohonan bantuan
81.	Proposal dari kelompok Tani Bina Banua desa uren kec. Halong Kab. Balangan Kalsel tahun 2010	Sda	Sda	Mohon Bantuan dana
82.	Proposal dari kelompok Tani maju bersama desa inan kec. Paringin selatan kab. Balangan	Sda	Sda	Mohon bantuan Dana
83.	Proposal dari kelompok Tani Maju bersama dari desa uren kec. Halong kab. Balangan kalsel Tahun 2010	Sda	Sda	Mohon bantuan dana perbaikan jalan dan jembatan
84.	Proposal dari majelis taklim ar raudhah jl. AES Nasution Rt. 2 Marabahan Kab. Barito Kuala tahun 2010	Sda	Sda	Mohon bantuan dana
85.	Proposal dari desa	Sda	Sda	Permohonan bantuan

Hal. 84 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kapul rt. 01 kec. Halong kab. Balangan ta 2010			dana pembangunan sarana air bersih
86.	Proposal kelompok tani meratus Jaya desa uren kec. Halong kab. Balangan Kalimantan Selatan tahun 2010	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana Perbaikan Jalan dan Jembatan Penyeberangan kelompok Tani
87.	Proposal dari panitia pembangunan gereja katolik santo mikael desa gunung riut kec. Halong kab. Balangan propensi kalsel 2010	Sda	Sda	Permohonan dana
88.	Proposal dari kelompok dari karang taruna sikai jaya desa baruh bahinu luar kec. Paringin selatan kab. Balangan	Sda	Sda	Mohon Bantuan Dana
89.	Proposal pembangunan Vihara Sati Sukha desa Mauya kec. Halong kab. Balangan kalsel tahun 2010	Sda	Sda	Mohon bantuan dana pembangunan vihara
90.	Proposal kelompok tani merantus jaya desa uren kec. Halong kab. Balangan kalsel tahun 2010	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana perbaikan jalan dan jembatan penyeberangan kelompok Tani
91.	Proposal karang taruna mina sari desa halangan kec. Pugaan kab. Tabalong	Sda	Sda	Mohon bantuan dana
92.	Proposal dari kelompok salawat desa sungai tabuk kec. Lampihong kab. Balangan prop. Kalsel 2010	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana untuk kelompok salawat
93.	Proposal dari panitia pembangunan langgar	Sda	Sda	Bantuan dana

Hal. 85 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



	Raudhatul Janah JI. Jend A. Yani Desa Telaga itar Rt. 4 Kec. Kelua kab. Tabalong			
94.	Proposal dari kelompok Tani Haur Batu Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan Prov. Kalsel 2010	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
95	Proposal rehap langgar darul falah desa sungai kali	Sda	Sda	Proposal rehap langgar darul falah desa sungai kali oleh: Panitia langgar darul falah JI.sungai kali desa kec. Barambai kab. Barito kuala Hp.0511 7342507
96	langgar darul muttaqien desa: cahaya baru kec. Jejangkit kab. Batola 2010			Proposal bantuan dana
97	langgar nurul hidayah desa barambai			Proposal rehap langgar nurul hidayah desa barambai oleh: Panitia langgar nurul hidayah JI. Pelita makmur rt.1 desa barambai kec. Barambai kab.batola hp. 0813 49403579
98	Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN dan APBD	Sda	Sda	Tabel rekapitulasi jumlah tenaga honorer (sesuai dengan PP.48 Jo PP.43. tahun 2007) yang di angkat oleh PPK/pejabat yang berwanang, bekerja di instansi pemerintah dan sumber pembiayaan non APBN/APBD
99	Desa pemurus kec.	Sda	Sda	Proposal permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Aluh-aluh kab. Banjar Kalimantan Selatan			bantuan dana perbaikan jalan di ajukan oleh pemerintah desa pemurus kec. Aluh-aluh kab. Banjar Kalimantan Selatan
100	Proposal persatuan Maulid al habsyi "al-hidayah" Alamat: jl.irigasi rt.15/04 kel.gambut kec.gambut kab.banjar	Sda	sda	Proposal persatuan Maulid al habsyi "al-hidayah"
101	panitia pembangunan langgar "Noor Hasan"	Sda	sda	Proposal panitia pembangunan langgar "Noor Hasan" desa sungai tabuk kab. Banjar tahun 2010
102	Rukun kematian "raudhatul jannah" kelurahan gambut kec.gambut kab.banjar jl.irigasi rt.15 rw.04	Sda	Sda	Proposal permohonan bantuan untuk pengadaan keranda mayat, pemandian mayat dan peralatan kematian
103	langgar "al-wustha" Alamat: jl. Jend. A. Yani desa sungai rukam I rt.2 kec.pugaan kab.tabalong	Sda	Sda	Proposal permohonan bantuan dana rehab total langgar "al-wustha"
104	Kelompok bina seni remaja "An Nauva Group"	Sda	Sda	Proposal permohonan bantuan alat musik
105	Proposal pembangunan langgar "nurul mubin" desa sebelimbingan kec.pulau utara kab.kotabaru	Sda	Sda	Panitia pembangunan langgar "nurul mubin" desa sebelimbingan kec.pulau utara kab.kotabaru
106	majelis ta'lim al-muhtadin	Sda	Sda	Proposal majelis ta'lim al-muhtadin desa sungai seluang kec. Kelumpang utara kab.kotabaru
107	kelompok Maulid habsyi	Sda	Sda	Proposal permohonan

Hal. 87 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	"nurul mu'minin" desa karya baru kec.tabunganen kab.barito kuala Kalimantan Selatan tahun 2010			bantuan dana
108	Proposal permohonan bantuan dana kerukunan budi bakti desa tabunganen tengah kec. Tabunganen kab.batola kelsel 2010	Sda	Sda	Proposal permohonan bantuan dana kerukunan budi bakti
109	kelompok yasinan dan burdah "al-zahra"	Sda	Sda	Proposal permohonan bantuan dana kelompok yasinan dan burdah "al-zahra" Desa karya baru kec. Tabunganen kab.barito kuala Kalimantan Selatan
110	taman pendidikan al-qur'an "siratul jannah"	Sda	Sda	Proposal permohonan bantuan dana taman pendidikan al-qur'an "siratul jannah" Desa tabunganen tengah kec.tabunganen kab.batola kalsel 2010
111	kelompok tani "bina banua"	Sda	Sda	Proposal permohonan bantuan dana kelompok tani "bina banua" Desa tabunganen pemurus kec.tabunganen kab. Batola Kalimantan Selatan 2010
112	desa aluh-aluh besar kec.aluh-aluh kab.banjar	Sda	Sda	Permohonan minta mesin pemotong rumput
113	Pengurus langgar "nurul islam" desa aluh-aluh besar kec.aluh-	Sda	Sda	Proposal permohonan bantuan genset



	aluhkab.banjar tahun 2009			
114	Desa aluh-aluh besar kec.aluh-aluh kab.banjar	Sda	Sda	Proposal permohonan bantuan dana rehabilitasi rumah dinas
115	desa pemurus kec.aluh-aluh kab.banjar	Sda	Sda	Proposal permohonan bantuan dana perbaikan jalan rel Di ajukan
116	Nota dinas permohonan bantuan dana	Sda	Sda	Nota dinas permohonan bantuan dana melalui biro kesra tahun 2010
117	Desa tabunganen pemurus kec.tabunganen kab.batola	Sda	Sda	Proposal bantuan dana kelompok Maulid al habsyi al-karomah
118	Panitia qurban langgar baiturrahman	Sda	Sda	Proposal bantuan dana penyelenggara qurban langgar baiturrahman kotabaru
119	perkumpulan Maulid habsyi "raudhatul wardiyah" jl.pengambangan rt.05 rw.02 kel.pengambangan kec.banjarmasin timur	Sda	Sda	Proposal perkumpulan Maulid habsyi "raudhatul wardiyah" jl.pengambangan rt.05 rw.02 kel.pengambangan kec.banjarmasin timur
120	persatuan sepak bola putra jingah tunggal	Sda	Sda	Proposal persatuan sepak bola putra jingah tunggal desa sungai rangas rt.02 kec.martapura barat kab.banjar
121	Panitia pelaksanaan ibadah qurban kompleks arraudah rt.6	Sda	Sda	Mohon bantuan dana Panitia pelaksanaan ibadah qurban kompleks arraudah rt.6
122	Gg. Swarga kel.antasari Kec.amuntai tengah	Sda	Sda	Proposal permohonan bantuan dana perbaikan

Hal. 89 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kab.hulu sungai tengah			peninggian jalan gg. Swarga kel.antasari Kec.amuntai tengah kab.hulu sungai tengah
123	al-qur'an "al anwar" kec.marabahan kab.barito kuala	Sda	Sda	Proposal permohonan bantuan lembaga pengembangan tilawatil quran pengelola taman pendidikan al-qur'an "al anwar" kec.marabahan kab.barito kuala
124	panitia qurban langgar miftahussa'adah desa dirgahayu rt.16 kec.pulau laut utara kab.kotabaru	Sda	Sda	Proposal Bantuan Dana
125	raudhatul atfhah al ikhlas tahun 2010			Proposal rehab gedung raudhatul atfhah al ikhlas tahun 2010
126	desa aluh-aluh besar kec.aluh-aluh kab.banjar	Sda	3 bundel	Proposal permohonan bantuan dana pembuatan jalan titian desa aluh-aluh besar kec.aluh-aluh kab.banjar
127	pengurus al kah "kubur muslimin" desa aluh-aluh besar kec.aluh-aluh	Sda	2 bundel	Proposal mohon bantuan jalan rel (jalan titian)
128	majelis ta'lim Al-Ihsan" desa keliling benteng ulu kec.martapura	Sda	Sda	Proposal bantuan dana untuk majelis ta'lim "barat
129	perkumpulan maulid al hasbyi al mujahid	Sda	Sda	Proposal Permohonan pembelian perlengkapan untuk menunjang kegiatan maulid
130	perkumpulan maulid habsyi "hidayatushshibyan" desa pandak daun kec.karang intan	Sda	Sda	Proposal permohonan bantuan dana

Hal. 90 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131	kelompok langgar raudhatul jannah desa pemakuan rt.006 kec.sungai tabuk	Sda	Sda	Proposal pengurus rukun kematian kelompok langgar raudhatul jannah desa pemakuan rt.006 kec.sungai tabuk
132	maulidurrasul "hidayatul ikhwan" rt.003 antasan sutun kec.martapura barat kab.banjar	Sda	Sda	Proposal mohon bantuan dana untuk maulidurrasul "hidayatul ikhwan" rt.003 antasan sutun kec.martapura barat kab.banjar
133	perkumpulan maulid perempuan "al-khairiah" keliling benteng tengah kec.martapura barat kab.banjar	Sda	Sda	
134	Panitia qurban mesjid miftahul jannah jl.veteran km.2 desa dirgahayu kotabaru	Sda	4 bundel	Permohonan bantuan dana qurban
135	jalan gang rt.4 desa panawakan	Sda	Sda	Proposal permohona bantuan peninggian jalan gang rt.4 desa panawakan
136	langgar nurul mubin	Sda	Sda	Proposal permohonan perbaikan langgar nurul mubin rt.IV panawakan kec.haur gading kab. Hulu sungai utara
137	Kelompok ibu-ibu PKK Desa Pindahan Baru Kec. Beruntung Baru Kab. Banjar 2010	Sda	Sda	Proposal permohonan bantuan
138	Mesjid "Nurul Islam" Desa Sidomulyo Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru	Sda	Sda	Proposal permohonan bantuan
139	Rehap langgar Nurul Jannah Desa Simpang Nungki	Sda	Sda	Proposal permohonan bantuan

Hal. 91 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jl. Simpang Nungki Rt. 2 Desa Simpang Nungki Kec. Cerbon Kab. Barito Kuala			
140	Kegiatan Maulid Al- Habsy Al-Hikmah Desa Pulau Alalak kec. Alalak Kab. Barito Kuala Tahun 2010	Sda	2 bundel	Proposal permohonan bantuan
141	Mesjid Minhajul Abidin Desa Antasan Besar Kec. Mandastana Kab. Batola Tahun 2010	Sda	2 bundel	Proposal permohonan bantuan
142	Majelis Taklim Nurut Taqwa Kel. Marabahan Kota Kab. Batola 2010	Sda	Sda	Proposal permohonan bantuan
143	Langgar "Nur Taqwa" Jl. Kamboja Rt. 002/002 Kel Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola	Sda	Sda	Proposal permohonan bantuan
144	Darul Gufran Padangbatung Kab. HSS	Sda	Sda	Pembuatan Mobil Ambulan Syarikat Kematian Langgar Darul Gufran Padangbatung Kab. HSS
145	DPRD Prov. Kalsel	Ruang Sekretaris DPRD	1 Bundel	Peraturan DPRD Prov. Kalsel Nomor 2 tahun 2009 tentang tata tertib DPRD Prov. Kalsel
146	DPRD Prov. Kalsel	Ruang Sekretaris DPRD	1 Bundel	DPRD Prov Kalsel Nomor 14 Tahun 2010 Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov Kalsel sekretariat DPRD Prov.Kalsel 2010
147	Keputusan DPRD tahun 2010	Ruangan arsip dan risalah	1 Bundel	Berkas dan dokumen Keputusan DPRD tahun 2010
148	Nama-nama Staf Fraksi	Sda	Sda	Nama-nama Staf Fraksi

Hal. 92 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DPRD Prov. Kalimantan Selatan			DPRD Prov. Kalimantan Selatan
149	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010	Sda	Sda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pemerintah prov. Kalimantan Selatan
149	Perda provinsi kalsel no: 7 tahun 2010	Sda	Sda	Pengelolaan taman hutan raya sultan adam
150	Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan no: 8 tahun 2010	Sda	Sda	Kepariwisata
151	Jawaban Gubernur atas pemberdaya umum fraksi-fraksi dana DPRD atas penyampaian 2 (dua) rancangan perda prov. Kalsel tahun 2010	Sda	Sda	Jawaban Gubernur atas pemberdaya umum fraksi-fraksi dana DPRD atas penyampaian 2 (dua) rancangan perda prov. Kalsel tahun 2010
152	Himpunan berkas perda Provinsi Kalimantan Selatan	Sda	Sda	Himpunan berkas perda Provinsi Kalimantan Selatan No: 1 tahun 2010 No: 2 tahun 2010 No: 3 tahun 2010 No: 4 tahun 2010 No: 5 tahun 2010 No: 6 tahun 2010
153	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pemerintah prov. Kalimantan Selatan	Sda	Sda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pemerintah prov. Kalimantan Selatan
154	Rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Sda	Sda	Rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010

Hal. 93 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155	Rancangan peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan no tahun 2011	Sda	Sda	Rancangan peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan no tahun 2011 Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
156	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010	Sda	Sda	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pemerintan Provinsi Kalimantan Selatan
157	Berkas DPRD Provinsi Kalimantan Selatan No: 20/DPRD/kp/2010	Sda	Sda	Tentang materi dan jadwal kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010
158	Laporan atus kas	Sda	Sda	Untuk Tahun Anggaran yang berakhir sampai dengan 31 desember 2010
159	Laporan Arus kas pemprop Kalimantan Selatan desember tahun 2010	Sda	Sda	Laporan Arus kas pemprop Kalimantan Selatan desember tahun 2010
160	Keputusan Sekertaris DPRD, No 49/SK/tahun 2010	Sda	Sda	Menugaskan staf sekertariat DPRD prov. Kalimantan Selatan dalam melaksanakan peninjauan/kunjungan kerja keluar daerah panitia khusus RPJMD prov. Kalimantan Selatan tahun 2010-2015.
161	Keputusan pimpinan DPRD Nomor 22/DPRD/KP/2010	Sda	Sda	Pembentukan piminan panitia khusus pembahasan terhadap 2 (dua) buah rancangan

Hal. 94 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				peraturan daerah prov. Kalimantan Selatan masing-masing
162	Keputusan pimpinan DPRD Nomor 11/DPRD/KP/2010			Tentang materi dan jadwal kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010
163	Peraturan daerah Kalimantan Selatan nomor 7 tahun 2011	Sda	Sda	Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
164	Laporan pertanggungjawaban rehab bangunan	Fraksi PBR	1 Bundel	TK./TP-AL QUR'An unit: 157 "Al-Mubaraqah" desa kuala tambangan kec.tangkisung kab.tanah bumbu
165	Laporan pertanggungjawaban rehab bangunan	Sda	Sda	Panitia pembangunan langgar "miftahul janah" desa benua tengah kec.tangkisung kab.tanah laut
166	Laporan pertanggungjawaban	Sda	Sda	Kelompok yasinan "nurul mukminin" desa benua tengah rt.09 kec.tangkisung kab.tanah laut
167	Laporan pertanggungjawaban rehab bangunan	Sda	Sda	Panitia pembangunan TK/TPA taman pendidikan Al-Qur'an "Raudatul Jannah" unit 252 desa benua tengah kec.tangkisung kab.tanah laut
168	Laporan pertanggungjawaban	Sda	Sda	Kelompok yasinan "Al-Mukaromah" desa benua tengah rt.10 kec.tangkisung kab.tanah

Hal. 95 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				laut
169	Laporan pertanggungjawaban	Sda	Sda	Kelompok al habsyi "Raudatul jannah" desa kuala tambangan rt.03 kec.tangisung kab.tanah laut
170	Proposal permohonan bantuan	Sda	Sda	Kapal nelayan tangkap 30 GT Oleh: Kelompok masyarakat nelayan "cahaya laut" desa wirittasi kec.kusan hilir
171	Proposal permohonan bantuan	Sda	Sda	Kelompok Maulid al-habsyi al-hurriah untuk pembelian alat-alat sound sistem dan terbang kelurahan murung sari kec.amuntai tengah tahun 2010
172	Proposal permohonan bantuan	Sda	Sda	Pintu gerbang desa badalungga hilir kec.wayan kab.balangan
173	Proposal pelatihan dasar waktunya untuk mengubah rsa takut dan menanamkan keberanian.	Fraksi PAN	1 Bundel	Unit kegiatan mahasiswa chip.com stimik indonesia banjarasin
174	Pengantar proposal kerjasama	Sda	Sda	Panitia pelaksanaan pelatihan dasar pelatihan dasar UKM chip.com sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer
175	Mohon sumbangan infak/wakaf untuk renovasi mesjid	Sda	Sda	Mohon sumbangan infak/wakaf untuk penyelesaian renovasi mesjid jami pelajar mulawarman
176	Kliping Alokasi Dana DPRD	Fraksi KBNR	1 Bundel	Media Kalimantan rabu, 15 desember 2010
177	Laporan pertanggungjawaban	Sda	Sda	Laporan pertanggungjawaban dana

Hal. 96 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



	dana bantuan			bantuan pembelian kelotok kelompok nelayan "wahyu illahi" desa tanjung kunyit kec.pulau laut kab.tanah bumbu
178	Proposal permohonan bantuan	Sda	Sda	Pembangunan mesjid "Istiqomah" desa banjarsari kec. Angsana kab.tanah bumbu kal-sel
179	Laporan pertanggungjawaban dana	Sda	Sda	Kelompok tani "maju bersama" desa pulau panci kec.kelumpang hilir kab.kotabaru
180	Laporan pertanggungjawaban permohonan bantuan	Sda	Sda	Laporan pertanggungjawaban permohonan bantuan komputer Kemonitas mahasiswa peduli tanah bumbu (KOMAPED TANBU) kalsel
181	Proposal permohonan bantuan			Proposal pembangunan mesjid "At-Taqwa" desa sari mulya. Blok F1 kec.mantewe kab.tanah bumbu Kalimantan Selatan 2010
182	Surat pengantar	Sda	Sda	Proposal masyarakat yang ditujukan ke Gubernur.
183	Daftar Proposal Permohonan Bantuan H. Puar Junaidi, S. Sos, Anggota Fraksi Golkar	Partai Golkar	1 Bundel (51 buah permohonan Bantuan)	Proposal Permohonan Bantuan Anggota Fraksi Golkar
184	Daftar Proposal Permohonan Bantuan H. Puar Junaidi, S. Sos, Anggota Fraksi Golkar	Sda	1 bundel (5 buah Permohona Bantuan)	Proposal Permohonan Bantuan Anggota Fraksi Golkar
185	Daftar Proposal	Sda	1 Bundel (7	Proposal Permohonan



	Permohonan Bantuan H. Puar Junaidi, S. Sos, Anggota Fraksi Golkar		buah proposal permohonan Bantuan)	Bantuan Anggota Fraksi Golkar
186	Daftar Proposal Permohonan Bantuan H. Puar Junaidi, S. Sos, Anggota Fraksi Golkar	Sda	1 Bundel (6 buah permohonan bantuan)	Proposal Permohonan Bantuan Anggota Fraksi Golkar
187	Daftar Proposal Permohonan Bantuan H. Puar Junaidi, S. Sos, Anggota Fraksi Golkar	Sda	1 Bundel (14 buah permohonan bantuan)	Proposal Permohonan Bantuan Anggota Fraksi Golkar
188	Daftar Proposal Permohonan Ir. H. Hasmy Fadillah Akbar, Anggota Fraksi Golkar	Sda	1 Bundel (15 buah permohonan bantuan)	Proposal Permohonan Bantuan Anggota Fraksi Golkar
189	Daftar Proposal Permohonan Bantuan Ir. H. Hasmy Fadillah Akbar, Anggota Fraksi Golkar	Sda	1 Bundel (30 buah permohonan bantuan)	Proposal Permohonan Bantuan Anggota Fraksi Golkar
190	Daftar Proposal Permohonan Bantuan Ir. Gusti Perdana Kesuma, Anggota Fraksi Golkar	Sda	1 Bundel (27 buah permohonan bantuan)	Proposal Permohonan Bantuan Anggota Fraksi Golkar
191	Daftar Proposal Permohonan Bantuan DR. H. Bardiansyah, MM, Anggota Fraksi Golkar	Sda	1 Bundel (11 buah permohonan bantuan)	Proposal Permohonan Bantuan Anggota Fraksi Golkar
192	Daftar Proposal Permohonan Bantuan Kol. TNI. (pur) Nasib Alamsyah, Anggota Fraksi Golkar	Sda	1 Bundel (24 buah permohonan bantuan)	Proposal Permohonan Bantuan Anggota Fraksi Golkar
193	Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi Partai Golkar	Sda	1 Bundel (15 buah permohonan	Proposal Permohonan Bantuan Anggota Fraksi Golkar

Hal. 98 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			bantuan)	
194	Nota Dinas untuk Anggota DPRD Fraksi Golkar	Sda	1 Bundel (37 buah Nota Dinas permohonan bantuan)	Nota Dinas Permohonan Bantuan dengan dari anggota Fraksi partai Golkar
195	Buku Kwitansi Tanda Terima dana bantuan Fraksi Golkar	Sda	1 Bundel (35 buah kwitansi tanda terima danabantuan sosial)	Kwitansi tanda terima dana bantuan sosial yang disalurkan Anggota Fraksi partai Golkar
196	Daftar Proposal Permohonan Bantuan H. M. Karno Ha, Anggota Fraksi Golkar	Sda	1 Bundel (29 buah permohonan bantuan)	Proposal Permohonan Bantuan Anggota Fraksi Golkar
197	Daftar Proposal Permohonan Bantuan Drs. H. Mansyah Sabri Anggota Fraksi Golkar	Sda	1 Bundel (17 buah permohonan bantuan)	Proposal Permohonan Bantuan Anggota Fraksi Golkar
198	Daftar Proposal Permohonan Bantuan DR. H. Bardiansyah, MM., Anggota Fraksi Golkar	Sda	1 Bundel (23 buah permohonan bantuan)	Proposal Permohonan Bantuan Anggota Fraksi Golkar
199	Daftar Proposal Permohonan Bantuan Drs. Syarifuddin Sabang Anggota Fraksi Golkar	Sda	1 Bundel (73 buah permohonn bantuan)	Proposal Permohonan Bantuan Anggota Fraksi Golkar
200	Buku Laporan Kegiatan Panitia Anggaran	Sda	1 Buku	Dari tanggal 03 Juni s/d 01 September 2009
201	Buku Laporan Kegiatan Paripurna	Sda	1 Buku	Dari tanggal 02 Juni 2005 s/d 03 September 2009
202	Buku Badan Pemeriksa Keuangan RI	Sda	1 Buku	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2010
203	Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sapi Korban	Ruang PKS	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS

Hal. 99 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	untuk Masyarakat Langgar Nurul Jannah			
204	Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan oleh Panitia Pengelola Pembangunan Langgar Darul Ulum	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
205	Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan oleh Panitia Pengelola Pembangunan Gedung TK/TPA Darussalam Unit 139 Parigi	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
206	Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan dari Kelompok Maulid Al- Habsyi Abnaus Shailihin	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
207	Laporan Penggunaan Dana Bantuan oleh Panitia Pengelola Pembangunan TK-TP Al-Quran Nurul Iman	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
208	Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan oleh Panitia Rombongan Al Habsyi Addahlaniah	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
209	Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan oleh Panitia Rombongan Al Habsyi Ar- Rahman	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
210	Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan oleh Panitia Pengelola	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS

Hal. 100 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kelompok Burdah7 Maulid Al Habsyi Ibnu Umar			
211	Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan dari Panitia Pengelola Langgar Darul Falah	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
212	Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan oleh Panitia Rombongan Al Habsyi Fuqaha	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
213	Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan oleh Panitia Pembangunan Rehap Nadil Ahli	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
214	Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan oleh Panitia Pembangunan Langgar Darus Salikin	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
215	Proposal Permohonan Bantuan Adhitya Kaya MahatVa Yudha	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
216	Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan oleh Lembaga Bina Remaja Al-Fikri	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
217	Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan oleh Pengelola KBIT Al Khair	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
218	Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan oleh TK Islam Terpadu Al-Khair	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219	Proposal Bantuan Penyediaan Sarana SMPIT AL-Khair Barabai	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
220	Seminar Parenting dan Training Pengembangan Diri	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
221	Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan oleh Panitia Rombongan Al Habsyi Nurul Alawiyah	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
222	Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan oleh Mesjid Asyasyuhada	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
223	Kelompok Usaha Bersama Mahasiswa Ikhtiar Sejahtera	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
224	Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Mandiri Jaya	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
225	Panitia Korban Hari Raya Idul Adha Ds Tabing Lering dan Telaga Bamban	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
226	Permohonan dana Kegiatan Persaudaraan Ibu Muslim	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
227	Perkumpulan Maulid AL-Habsy Sullamul Ulum	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
228	Permohonan Bantuan Dana Tim Futsal	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
229	Permohonan Dana Bantuan TK/TPA Darussalam	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
230	Proposal Permohonan Bantuan Ds Lunjuk	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan

Hal. 102 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Fraksi PKS
231	Permohonan Bantuan Persatuan Maulid Habsy Ar-Rahmah	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
232	Panitia Musyawarah Wilayah Forum Lingkar Pena	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
233	Panitia Qurban Idul Adha Ds. Pasayangan Selatan	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
234	Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan oleh TK AL-Quran AL-Anshor	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
235	Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan oleh Rukun Kematian AL-Yusro	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
236	Ikatan Pelajara Madrasah AL- Khairiyah	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
237	Bantuan Dana Kelompok Usaha Bersama Sulam Bordir	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
238	Bantuan Dana Panitia Pembangunan MCK	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
239	Pengurus Musholla AL-Hudaibiyah	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
240	Proposal Kegiatan & Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan oleh Jaringan Aktifitas Pelajar	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
241	Laporan Pertanggungjawaban	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan

Hal. 103 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dana Bantuan oleh Barisan Pemadam Kebakaran KBT			Fraksi PKS
242	Laporan Permohonan Dana Bantuan oleh DPD HIPMIKINDO	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
243	Proposal permohonan dana bantuan dari Ds. Podok Majelis Talim Idhaul hair	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
244	Proposal permohonan dana bantuan Langgar Nurul Hayat	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
245	Proposal permohonan Bantuan Dana AL-Habsyi	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
246	Laporan Penggunaan Dana Bantuan Langgar Al-Ikhlas	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
247	Proposal Permohonan Bantuan Dana untuk Perkumpulan Tahlilan Muth'mainah	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
248	Permohonan Bantuan Rukun Kematian Al-Inabah	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
249	Proposal Bantuan Langgar At-Taubah	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
250	Panitia Perbaikan Langgar Syafa'Atul Ummah	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
251	Bantuan Dana Maulid Habsy Al-Muhajirin	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
252	Proposal Renovasi Langgar Darul Khairiyah	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
253	Permohonan Bantuan	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal

Hal. 104 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ikatan Remaja Muhammadiyah			Permohonan Bantuan Fraksi PKS
254	Proposal Pembelian Peralatan untuk perkumpulan rukun kematian	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
255	Proposal perbaikan Gedung Belajar	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
256	Permohonan Fasilitas Umum Perbaikan Jalan	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
257	Permohonan Perbaikan/Rehab Gedung Blejar Nurul Huda	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
258	Permohonan Perbaikan Jalan Usaha Tani Ds Sei. Rangsas	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
259	Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Olahraga Tunas Membangun	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
260	Permohonan Bantuan Dana Perkumpulan Maulid Nurul Hikmah	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
261	Permohonan Bantuan Dana Perkumpulan Maulid Ar-Raudah	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
262	Permohonan Bantuan Dana Perkumpulan Langgar Nurul Hikmah	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
263	Permohonan Bantuan Dana Perkumpulan Langgar Al Mujahidin	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
264	Permohonan Bantuan Dana Perkumpulan Maulid dan Rukun Kematian Al-Muhajirin	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS

Hal. 105 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265	Permohonan Bantuan Dana Kelompok Usaha Bersama Sejahtera Sabarataan Panitia pembangunan langgar Darul Yakin	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
266	Proposal Permintaan Bantuan Bimbingan Belajar Kencana Ungu	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
267	Proposal Renovasi Langgar Darul Khariyah	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
268	Proposal bantuan Dana Keiompok Usaha Bersama Maju Mandiri	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
269	Proposal Kegiatan AMJ Kepemudaan	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
270	Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Siring & Alkah Raudhatul Anwar	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
271	Permohonan Bantuan Dana Renovasi Mesjid Al- Istiqmah	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
272	Proposal Kelompok Bimbingan Belajar Kencana Ungu	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
273	Proposal bantuan dana Yayasan Ishlahul Ummah Martapura	Sda	1 Bundel	Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS
274	Nota Dinas Permohonan Bantuan dari Anggota Fraksi Partai PKS	Sda	1 Bundel (13 buah Nota Dinas permohonan bantuan)	Daftar Nota Dinas permohonan bantuan dari Anggota Fraksi PKS
275	Arsip dan Proposal Permohonan Bantuan dari Anggota Fraksi	Sda	1 Bundel (25 buah proposal)	Arsip dan Daftar Proposal Permohonan Bantuan dari Anggota Fraksi PKS

Hal. 106 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Partai PKS		permohonan bantuan)	
276	Antara lain rekaman dari DPRD I & II	Gedung DPRD Prov. Kalsel	4 Buah Jenis Kaset Besar	Kaset Besar Rekaman Rapat Periode Tahun 2009 s/d 2010
277	Antara lain Rekaman Rapat DPRD Periode Tahun 2009 s/d 2010	Gedung DPRD Prov. Kalsel	20 Buah Jenis Kaset Kecil	Kaset Kecil Rekaman Rapat Periode Tahun 2009 s/d 2010
278	Perkumpulan sholawat muslimah "darul aman" desa keramat kec.martapura timur kab.banjar	Fraksi PKS	1 lembar	Permohonan bantuan dana
279	Pimpinan daerah persaudaraan muslimah (PD Salimah)	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
280	Pengelola kuburan muslimin "ahsanud diyar" keliling benteng tengah kec.martapura barat kab.banjar	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
281	Kelompok usaha bersama "Al-Jam'iyah" keliling benteng ulu kec.martapura barat kab.banjar	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
282	Perkumpulan sholawat "Al-Jami" keliling benteng tengah kec.martapura barat kab.banjar	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
283	Pengelola alkah/kuburan "darul hasanah" rt.03 keliling benteng tengah kec.martapura barat kab.banjar	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
284	Perkumpulan maulid al habsyi "nida'ul khairat"	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana

Hal. 107 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



	desa astambul kota kec.astambul kab.banjar			
285	Panitia pembangunan pendopo TK.AI-Qur'an Assu'ada astambul kota kec. Astambul kab.banjar	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
286	Kelompok study islam ar-rasyied SMA negri 1 gambut	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
287	Kelompok tani "sejahtera bersama" jl.a.yani km.14 rt.22 A kel.gambut kec.gambut kab.banjar	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
288	Penitia pelaksanaan rehab TK/TPA al-fajar unit 148	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
289	Kelompok tani (poktan) "landung berseri" desa tanjau landung kec.sungai tabuk	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
290	operasional RA Mulia	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
291	Panitia pembangunan jalan titian desa pondok rt.03	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
292	operasional RA Mulia	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
293	Panitia pembangunan jalan titian desa pondok rt.03 permohonan bantuan jembatan titian	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
294	Panitia pembangunan jalan titian desa pondok rt.03 bantuan dana alat- alat pertanian desa pondok	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
295	Permohonan bantuan	Sda	Sda	Permohonan bantuan

Hal. 108 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PAUD sejahtera kec.aluh-aluh desa tanipah			dana
295	Panitia pembangunan jalan titian desa pondok rt.03 permohonan bantuan jembatan titian	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
296	maulid al-habsyi al- azhar	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
297	rehab pelabuhan/batang desa labat muara rt.01	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
298	untuk kelancaran dan kelangsungan maulid al- habsyi "syafaatul aulia" desa alwiran	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
299	untuk rehab langgar sullamul hidayah	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
300	Pemberitahuan pelaksanaan PAUD Pendidikan anak usia dini (PAUD) Ar-raudah	Sda	Sda	Surat pemberitahuan
301	perkumpulan maulid al habsyi "syafa'atul qiyamah" desa jati baru	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
302	rukun kematian "RKM" desa jati baru kec.astambul	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
303	karang taruna "karya sejati" desa jati baru kec.astambul	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
304	perkumpulan burdah "hidayatullah" desa benua riam kec.aranio	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
305	persatuan sepak bola futsal FUMA FC desa keramat kec.martapura timur	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
306	perkumpulan pengrajin "bina remaja" desa	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana

Hal. 109 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	keramat kec.martapura timur			
307	perkumpulan maulid habsyi "darul aman" desa keramat kec. Martapura timur	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
308	perkumpulan rukun kematian "darul aman" desa keramat kec. Martapura timur	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
309	karang taruna "permata" desa keramat kec.martapura timur	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
310	rukun kematian al-mujahidin jl.TMD rt.03 desa pematang baru	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
311	persatuan sholawat dan burdah al anshor	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
312	kelompok tani "bina sewarga" desa melayu ilir kec.martapura	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
313	majelis ta'lim "raudhatul jannah" desa melayu ilir rt.001 kec.martapura timur kab.banjar	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
314	pengelola alkah "raudhatul jannah" desa melayu ilir kec.martapura timur kab.banjar	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
315	panitia langgar "raudattutaqwa" desa pematang danau	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
316	panitia rukun kematian "al-ikhlas" desa pematang danau rt.03	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
317	kerukunan fardhu kifayah langgar manhajuttaqwa	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana

Hal. 110 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



	liabdillah			
318	karang taruna "sederhana muda" desa melayu tengah rt.01	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
319	pengurus mesjid "nurul yaqin" desa akar bagantung	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
320	perkumpulan maulid habsyi "raudatus saliqien"	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
321	karang taruna "kayuh baimbai" desa akar bagantung kec.martapura timur kab.banjar	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
322	panitia pembangunan madrasah "mathla'ul anwar"	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
323	Perkumpulan maulid habsyi wanita "nurul yaqin"	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
324	Perkumpulan maulid al habsyi darul mustofa	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
325	Perkumpulan burdah muslimah "raudhatul jannah"	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
326	Karang taruna indonesia "gawe sabumi" desa melayu ilir	Sda	2 lembar	Permohonan bantuan dana
327	Perkumpulan maulid al habsyi pria musholla "raudhatul jannah"	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
328	Perkumpulan pengajian "qirooatul qur'an" desa sungai rangas ulu kec.martapura barat kab.banjar	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
329	Perkumpulan "ridho bersama" desa sungai	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rangas ulu kec.martapura barat			
330	Pendidikan anak usia dini (PAUD) m"melati"	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
331	Madrasah diniyah awaliyah miftahul falihin desa sruian kec.mataraman	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
332	Mesjid jami at-taqwa surian kec.mataraman	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
333	Pemerintah kabupaten banjar kec.aluh-aluh desa pemurus	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
334	Pemuda karang taruna desa surian kec.mataraman	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
335	Perkumpulan sholawatan dalailul khoirat ibu-ibu dan remaja putri	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
336	Karang taruna bina putra desa benua riam kec.aranio	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
337	Perkumpulan maulid al habsyi "hidayatullah" desa benua riam kec.aranio	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
338	Perkumpulan maulid habsyi TK TPA Al-fiathul jannah	Sda	Sda	Permohonan bantuan dana
339	Perkumpulan sholawat "Al-Jami" benteng keliling ulu	Sda	2 bundel	Laporan pertanggung jawaban
340	Penengelola kuburan muslimin "ahsanud diyah"	Sda	Sda	Laporan pertanggung jawaban
341	Kelompok usaha bersama "Al-Jam'iyah"	Sda	Sda	Laporan pertanggung jawaban
342	Pengelola	Sda	Sda	Laporan pertanggung

Hal. 112 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	alkah/kuburan "darul hasanah"			jawaban
343	Permohonan Bantuan Dana oleh Mauli Al-Habsy Dakwatul Aulad	Sda	Sda	Laporan Bantuan Dana
344	Laporan Bantuan Dana Perkumpulan Sholawat dan Rukun Kematian Al-Muhajirin	Sda	Sda	Laporan Bantuan Dana
345	Laporan pertanggungjawaban Bantuan Dana Panitia Perbaikan Jalan Usah Tani Masyarakat	Sda	Sda	Laporan pertanggungjawaban
346	Laporan Bantuan Dana kepentingan Fasilitas Umum TK Nurul Huda	Sda	Sda	Laporan Bantuan Dana
347	Laporan Bantuan Dana TK Anggrek	Sda	Sda	Laporan Bantuan Dana
348	Laporan Pertanggungjawaban Rukun Kematian Al-Inabah	Sda	Sda	Laporan pertanggungjawaban
349	Laporan Pertanggungjawaban Langgar At-Taubah	Sda	Sda	Laporan pertanggungjawaban
350	Laporan pertanggungjawaban perkumpulan Tahlilan Muth-Ma'inah	Sda	Sda	Laporan pertanggungjawaban

Penetapan Nomor 86/Persit/TPK/2013/PN.BJM tanggal 03 Januari 2013
atas benda berupa:

DAFTAR BARANG BUKTI

Penetapan Sita Nomor 86/persit/TPK/2013/Bjm

No	Nama Barang	Ruangan	Nama stempel yang disita	Jumlah	Tempat penyitaan
1.	Stempel	Fraksi	1. Pengurus Langgar	30	Di filling

Hal. 113 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



		partai PKS	Nurul Arifin desa Tarangan Kec. Paringin Selatan kabupaten Balangan	buah	kabinet 20 buah di loker 10 buah
			2. Pemerintah Kab. Tanah laut, sekretariat Desa pandahan kec Bati-bati		
			3. BPK (pelampitan hilir)		
			4. Pemerintah kab Tanah, sekretaris Desa Nusa Indah kec. Bati-bati		
			5. Panitia Pelaksana Cahaya Ramadhan 1429 H Kec. Muara Uya.		
			6. Panitia Rehabilitasi total langgar darul Abidin HSU manarap hulu kec. Danau panggang.		
			7. Kelompok Habsy Desa paya Rt. 02 Kec. BAS		
			8. kelompok tani swarga I Desa Abung Kec. Limpasu Kab. HST		
			9. Persatuan Yasinan dan shalawat Darut Taqwa Jl. Gerilya Komp. Mahatama kel. Tanjung pagar kec. Banjarmasin Selatan		
			10. Lembaga Swadaya masyarakat cagar Banua		
			1. Kelompok Remaja Desa Batang Bahalang Rt. 001 Rw.001 Kec. Lambuan Amas Selatan Kab. HST		
			2. Pemerintah kab. HSU		

Hal. 114 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



			<p>Kepala Desa Sei pandan hilir Kec. Sungai pandan</p> <p>13. Lembaga Tamqin Al-Quran Syifa Al Ummah Tabalong</p> <p>14. Pemerintah Kab. Barito Kuala Kepala Desa Sei Teras luar Kec. Tabunganen</p> <p>15. Youth Power</p> <p>16. Pemerintah Kab. Barito Kuala Kepala Desa Parimata Kec. Belawang</p> <p>17. Kelapa Desa Benga Tengah Kec. Takisung Kab. Tanah Laut.</p>		
			<p>18. Perkumpulan bordah dan Al-habsy nor rahmah Kec. Sei pandan Alabio</p> <p>19. Toko Nupla Jl. PS Bitin melayani phptp Copy,pres laminating, jual alat tulis cetak undangan cuci cetak film warna dan hitam putih</p> <p>20. warung makan mama agus</p> <p>21. Panitia Reses Anggota DPRD Provinsi Kalse.</p> <p>22. Kong Ko's Advertising</p> <p>23. Cetering Mirna Balangan</p> <p>24. Cetering mama udin</p> <p>25. warung makan tabunganen Barito</p>		



			<p>Kuala</p> <p>26. warung makan minum kaganangan pasar Alabio</p> <p>27. universitas gadjah mada</p> <p>28. Toko Siska foto Copy, jual alat tulis, laminating cetak, undangan dll simpang 3 tugu Alabio</p> <p>29. warung makan minum ibu Dewi Pelaihari Fajar jual buku, alat tulis/kantor, bikin stempel, sablon, kartu, dll, muka al ma'arif Amuntai</p>		
2.	Stempel	Fraksi partai Golkar	<p>1. Toko Yulia, menjual alat-alat tulis/olahraga, melayani foto Copy laminating dan cuci cetak foto Jl. Bahagia Pasar Paringin.</p> <p>2. Catering Hesi terima pesanan makanan & snack Desa karau Kec. Limpasu Hulu Sungai Tengah</p> <p>3. Catering Rusni Barabai</p> <p>4. Rizki foto Copy jual alat-alat sekolah/kantor Jl. Abdul Muis Ridani Barabai</p> <p>5. Catering Salasiah Desa Mahang Sungai Anyar Kec. Pandawa HST</p> <p>6. Catering Irus Kec. Juai Kab. Balangan</p> <p>7. Catering Diana Kec.</p>	12 buah	Di filling kabinet atas nama H.M Karno

Hal. 116 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



			Labuyan Mas HST		
			8. Catering Marni Kec. Halong 9. Pemerintah Kab. Balangan Kepala Desa Juai Kec. Juai 10. Pemerintah Kab. Balangan Kepala Desa Sungai Batung Kec. Juai 11. Pemerintah Kab. Balangan Kepala Desa Gunung Riut Kec. Halong Pemerintah Kab. Balangan Lurah Paringin Timur Kec. Paringin.		
3.	Stempel	Fraksi partai PDIP	1. Pemerintah Kabupaten Kotabaru Kepala Desa Kulipak kec. Pulau Laut Timur 2. Rukun Tetangga Rt. 20 5 MP Sei Bilu 3. Pemerintah Kab. Kotabaru Kepala Desa Serongga Kec. Kelumpang Hilir 4. Rukun Tetangga Rt. 26 Jl. Thamrin 5. Catering masakan khas Banjar Bunda Nayla Jl. A. Yani Km 29 Banjarbaru	5 buah	Di filling kabinet Ruang Rapat
4.	Proposal	Fraksi partai Golkar	1. Proposal perbaikan mesjid Annoor Jl. Veteran Pengambangan Indah	Buah	Di meja Drs. Syarifudin Sabang

Hal. 117 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



			Banjarmasin		
5.	Proposal	Fraksi partai Golkar	<ol style="list-style-type: none">1. Karang Taruna "Astam" Desa Sungai Kupang Kec. Kandungan kab. HSU2. Kelompok Tani dan Perikanan "Amandit" Kab. HSS3. Pengurus langgar "Darut Taubah" Pagar Haur Desa Jelatang Kec. Padang Batung HSS4. Pengurus Mesjid Noor Pagar Batung Desa Jelatang kab. HSS5. Karang Taruna "Cinta Maju" Desa Jelatang kab. HSS6. Kelompok Tani Maju Bersama Desa Jelatang Kab. HSS7. Jamaah Maulid Al-Habsyi Al-Habibah Kec. Padang Batung HSS8. Taman Kanak-kanak Al-Quran Mirajul Ulum Kab. HSS		
			<ol style="list-style-type: none">9. Permohonan Bantuan Dana Karang Taruna bin Bersama Kab. HSS10. Kelompok Tani Suka Maju Desa Jelatang Kab. HSS11. Permohonan bantuan kelengkapan Tim sepak Bola Karang Taruna Kab. HSS		

Hal. 118 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



			<p>12. Kelompok Tani Karya Bersama Desa Malinau kab. HSS</p> <p>13. Proposal Pembekalan penguahan karang taruna kab. HSS</p> <p>14. Persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia "Empang Datu" Kab. HSS</p> <p>15. Pengurus rukun kemtian Firdaus kab. HST</p>		
6.	Proposal	Fraksi partai Golkar	<p>1. Proposal Bantuan Dana Kelompok Usaha Produktif (KUPP) kab. HSU</p> <p>2. Proposal langgar Darunnaja Kab. Balangan</p> <p>3. Taman Kanak-kanak Nurul Muksinin kab. Balangan</p> <p>4. Taman kanak-kanak Pertiwi VI Tanta</p>	1 buah	Di meja Dr. H. Bardiansyah, MM
7.	Kwitansi kosong	Fraksi partai PDIP	1 buah	1 buah	Ada cap stempel Pemerintah Desa Gudang Tengah Kec. Sungai Tabuk dan Tanda Tangan An Abdul Kadir
8.	Kwitansi kosong	Fraksi partai PDIP	1 buah	1 buah	Ada cap stempel Pemerintah Desa Tanipah Kec. Aluh-



					Aluh dan Tanda Tangan An Ahjani
--	--	--	--	--	---------------------------------------

Sebagaimana diuraikan dalam berkas perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD MUCHLIS GAFURI;

8. Membebaskan biaya pada negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1295 K/Pid.Sus/2015, tanggal 13 April 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm tanggal 19 Januari 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa H. FITRI RIFANI, SH., MH., bin H. DARKANI SEMAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm tanggal 19 Januari 2015 yaitu:
- Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri

Hal. 120 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor 66/Persit/TPK/2013/PN.Bjm, tanggal 28 Agustus 2013, nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 365;

- Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 78/Persit/TPK/2013/PN.Bjm, tanggal 28 Oktober 2013;
- Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 84/Persit/TPK/2013/PN.Bjm, tanggal 18 Desember 2013;
- Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 86/Persit/TPK/2013/PN.Bjm, tanggal 3 Januari 2013;

Sebagaimana diuraikan dalam berkas perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD MUCHLIS GAFURI;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Surat Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 5 Maret 2018 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 11 Januari 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya tidak sepedapat dengan *Judex Juris* dalam hal menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 121 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tipikor *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya berpendapat *Judex Juris* melakukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena alasan pertimbangan *Judex Juris* dalam putusannya melanggar ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 3 Tahun 1974. Putusan *Judex Juris* hanya mengambil alih alasan memori kasasi Penuntut Umum untuk dijadikan pertimbangan tanpa menganalisis substansi Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009. *Judex Juris* seharusnya membuat pendapat/pertimbangan sendiri. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana keberatan terhadap pertimbangan *Judex Juris* tentang kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan atributif, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang putusan *Judex Juris* yang dipandang bertentangan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pertimbangan *Judex Juris* yang mengambil alih alasan/pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam memori kasasinya untuk dijadikan sebagai pendapat sendiri dari *Judex Juris* adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Ayat (1). Ketentuan Pasal 50 Ayat (1) tersebut tidak mempersoalkan dari mana sumber alasan/ pendapat *Judex Juris*, apakah merupakan pendapat sendiri atau pendapat Penuntut Umum atau pendapat Penasihat hukum. Hal yang terpenting menurut ketentuan tersebut bahwa dalam suatu putusan pengadilan wajib memuat alasan dan dasar putusan, memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili tanpa mempersoalkan dari mana sumber alasan/pendapat yang dijadikan sebagai pendapat sendiri;
- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang

Hal. 122 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan Terdakwa bersalah dalam melaksanakan kewenangan atributifnya sedangkan hal ini tidak diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 40 Tahun 2009. Kewenangan atributif yang dimaksud *Judex Juris* benar tidak diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 40 Tahun 2009 karena kewenangan atributif merupakan prinsip dasar dalam hukum administrasi yang diterapkan dalam pengelolaan pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat;

- Bahwa kewenangan atributif yang dilanggar, atau tidak dilaksanakan dengan baik dan benar oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana, misalnya tidak melaksanakan fungsi koordinasi, pengendalian antar pejabat atau lembaga yang terkait dalam proses pemberian dan penyaluran dana Bansos agar tepat guna dan tepat sasaran sebagaimana diatur Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 40 Tahun 2009;
- Bahwa terungkap fakta persidangan salah satu faktor penyebab terjadinya pemberian dan penyaluran dana Bansos yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu terkait dengan tidak terpenuhinya syarat administrasi dari pemohon dana Bansos, dan tidak terpenuhinya administrasi pelaporan pertanggungjawaban dana Bansos. Padahal pembinaan administrasi perkantoran dan proyek merupakan tugas, kewajiban dan tanggungjawab Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana dalam pemberian dan penyaluran dana Bansos;
- Bahwa keberadaan/eksistensi Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana dalam pemberian dan penyaluran dana Bansos tidak sekedar berfungsi sebagai cap/stempel dengan memberikan rekomendasi atas setiap permohonan bantuan dana Bansos. Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana wajib berperan aktif untuk mengendalikan dan mencegah terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan pemberian dan penyaluran dana Bansos;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan pembinaan seharusnya mencegah diri sendiri untuk tidak menandatangani nota dinas/rekomendasi kemudian surat tersebut dijadikan dasar dalam proses

Hal. 123 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutan oleh pihak terkait untuk menyalurkan, memberikan dan pencairan dana Bansos;

- Bahwa posisi yang paling ideal bagi Terpidana dalam kedudukannya sebagai Kepala Biro Kesra untuk terhindar dari proses atau jeratan hukum yaitu seharusnya tidak melakukan penandatanganan surat/dokumen atau nota dinas sebagai bentuk rekomendasi membenarkan segala isi dan konsekuensinya dalam penandatanganan/disposisi oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terpidana, terjadi penerima dana Bansos yang tidak berhak mendapatkan, dan kemudian terdapat penerima dana Bansos yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban dana Bansos. Hal ini tentu bertentangan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 40 Tahun 2009;
- Bahwa setelah memeriksa secara cermat segala surat/dokumen/kuitansi terkait pengeluaran/penyaluran dana Bansos maka kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* sebesar Rp18.805.550.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b atau c KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Mengingat Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Hal. 124 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **H. FITRI RIFANI, SH., MH., bin H. DARKANI SEMAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **24 September 2018** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
Ttd./Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./Dr.H.M.Syarifuddin,S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
Ttd./Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 125 dari 125 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)